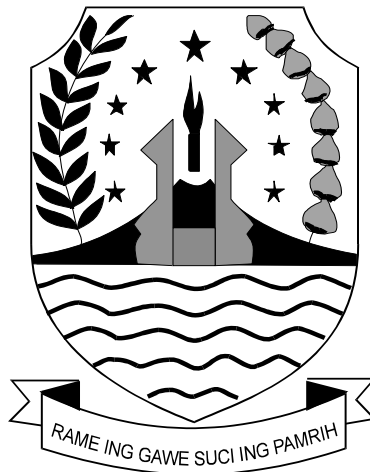


**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2005-2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2009**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 merupakan pedoman rencana pembangunan 20 tahunan yang akan dijabarkan pada rencana pembangunan 5 tahunan. RPJPD Kabupaten Cirebon memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Adapun aspek pembangunan yang dijabarkan meliputi agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur wilayah, tata ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, politik, hukum, ketertiban dan ketentraman masyarakat, pemerintahan dan pembangunan desa, dan aparatur.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama merumuskan dokumen RPJPD dan pemerintah daerah berharap seluruh masyarakat dapat membantu dalam implementasi dan pengawasannya.

Sumber, Juli 2009

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | I - 1 |
| 1.1 Pengantar | I - 1 |
| 1.2 Pengertian | I - 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | I - 3 |
| 1.4 Landasan Hukum | I - 4 |
| 1.5 Tata Urut | I - 5 |
| 1.6 Kerangka Pikir | I - 5 |
| 1.7 Proses Penyusunan | I - 6 |
| BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN CIREBON | II - 1 |
| 2.1 Kondisi Saat Ini | II - 1 |
| 1. Letak Wilayah | II - 1 |
| 2. Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan ... | II - 1 |
| a. Administrasi Pemerintahan | II - 1 |
| b. Administrasi Pembangunan | II - 1 |
| 3. Keadaan Klimatologi | II - 2 |
| 4. Keadaan Hidrologi | II - 2 |
| 5. Keadaan Topografi | II - 3 |
| 2.1.1 Keagamaan | II - 4 |
| 2.1.2 Kesehatan | II - 5 |
| 1. Angka Harapan Hidup | II - 5 |
| 2. Angka Kematian Bayi | II - 6 |
| 3. Balita Penderita Gizi Buruk | II - 6 |
| 4. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk | II - 7 |

| | |
|---|---------|
| 5. Rasio Dokter dan Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk | II - 8 |
| 2.1.3 Pendidikan | II - 8 |
| 1. Ketersediaan Sekolah, Guru dan Murid | II - 9 |
| a. Tingkat Pendidikan Dasar | II - 9 |
| b. Tingkat Pendidikan Menengah | II - 10 |
| 2. Angka Partisipasi | II - 12 |
| 2.1.4 Ekonomi | II - 14 |
| 1. Pertumbuhan Ekonomi | II - 14 |
| 2. Tingkat Inflasi | II - 15 |
| 3. Kemiskinan | II - 15 |
| 4. Ketenagakerjaan | II - 19 |
| 5. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | II - 20 |
| 2.1.5 Infrastruktur Wilayah | II - 22 |
| 1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik | II - 22 |
| 2. Rasio Jaringan Irigasi | II - 23 |
| 3. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih | II - 27 |
| 4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah per Satuan Penduduk | II - 28 |
| 5. Rasio Rumah Layak Huni | II - 29 |
| 6. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik | II - 30 |
| 2.1.6 Politik | II - 31 |
| 2.1.7 Hukum | II - 33 |
| 2.1.8 Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat | II - 34 |
| 2.1.9 Pemerintahan dan Pembangunan Desa | II - 35 |
| 2.1.10 Aparatur | II - 36 |
| 2.2 Tantangan | II - 37 |
| 2.2.1 Keagamaan | II - 37 |

| | |
|--|----------------|
| 2.2.2 Kesehatan | II - 37 |
| 2.2.3 Pendidikan | II - 38 |
| 2.2.4 Ekonomi | II - 38 |
| 2.2.5 Infrastruktur Wilayah | II - 38 |
| 2.2.6 Politik | II - 39 |
| 2.2.7 Hukum | II - 39 |
| 2.2.8 Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat | II - 39 |
| 2.2.9 Pemerintahan dan Pembangunan Desa | II - 40 |
| 2.2.10 Aparatur | II - 40 |
| 2.3 Modal Dasar | II - 40 |
| BAB III VISI DAN MISI | III - 1 |
| 3.1 Visi Pembangunan Daerah | III - 1 |
| 3.2 Misi Pembangunan | III - 2 |
| BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN | |
| JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025 | IV - 1 |
| 4.1 Arah Pembangunan | IV - 2 |
| 4.1.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas | IV - 2 |
| 4.1.2 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Lestari | IV - 3 |
| 4.1.3 Mewujudkan Perekonomian yang Kuat | IV - 3 |
| 4.1.4 Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel | IV - 5 |
| 4.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan | IV - 6 |
| 4.2.1 RPJM Daerah Pertama (2005-2009) | IV - 6 |
| 4.2.2 RPJM Daerah Kedua (2009-2014) | IV - 7 |
| 4.2.3 RPJM Daerah Ketiga (2014-2019) | IV - 14 |
| 4.2.4 RPJM Daerah Keempat (2019-2024) | IV - 21 |
| 4.2.5 RPJM Daerah Kelima (2024-2025) | IV - 29 |
| BAB V PENUTUP | V - 1 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------------|--|---------|
| Tabel 2.1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 4 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 5 |
| Tabel 2.3 | Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 5 |
| Tabel 2.4 | Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 6 |
| Tabel 2.5 | Prosentase Penderita Gizi Buruk Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 6 |
| Tabel 2.6 | Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk Tahun 2003-2007 | II - 7 |
| Tabel 2.7 | Rasio Dokter dan Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk Tahun 2003-2007 | II - 8 |
| Tabel 2.8 | Rasio Sekolah Pendidikan Dasar Dengan Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 9 |
| Tabel 2.9 | Rasio Guru Pendidikan Dasar Dengan Jumlah Murid Pendidikan Dasar di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 10 |
| Tabel 2.10 | Rasio Sekolah Dengan Penduduk Usia SMP di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 10 |
| Tabel 2.11 | Rasio Guru Dengan Murid SMP di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 11 |
| Tabel 2.12 | Rasio Sekolah Dengan Penduduk Usia SMA di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 12 |
| Tabel 2.13 | Rasio Guru Dengan Murid SMA di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 12 |

| | |
|--|---------|
| Tabel 2.14 APK dan APM Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 13 |
| Tabel 2.15 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 13 |
| Tabel 2.16 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 14 |
| Tabel 2.17 PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 15 |
| Tabel 2.18 Tingkat Inflasi Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 15 |
| Tabel 2.19 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Cirebon Tahun 2004 dan Tahun 2006 | II - 18 |
| Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2003-2007 | II - 21 |
| Tabel 2.21 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 22 |
| Tabel 2.22 Data Daerah Irigasi di Wilayah Kabupaten Cirebon | II - 23 |
| Tabel 2.23 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Cirebon Tahun 2003- 2007 | II - 26 |
| Tabel 2.24 Cakupan Pelayanan Air Bersih PDAM Kabupaten Cirebon | II - 28 |
| Tabel 2.25 Jumlah dan Lokasi Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Cirebon | II - 29 |
| Tabel 2.26 Rasio Jumlah Daya Tampung TPS per Satuan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 29 |
| Tabel 2.27 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 30 |
| Tabel 2.28 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Cirebon yang Menggunakan Listrik Tahun 2003-2007 | II - 31 |
| Tabel 2.29 Angka Kriminalitas di Kabupaten Cirebon Tahun 2003- 2007 | II - 34 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|---------|
| Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 | I - 7 |
| Gambar 2.1 Perkembangan Keluarga Miskin Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 16 |
| Gambar 2.2 Perkembangan Keluarga Miskin Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 16 |
| Gambar 2.3 Perkembangan Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja dan Pekerja di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 (dalam ribuan) | II - 19 |
| Gambar 2.4 Grafik Kesempatan Kerja di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 20 |
| Gambar 2.5 Grafik Tingkat Pengangguran di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 20 |
| Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 | II - 21 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Pembaharuan tata kelola pemerintahan, termasuk yang berlangsung di daerah telah membawa perubahan dalam berbagai dimensi, baik struktural maupun kultural. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan di daerah, telah dikeluarkan peraturan perundang-undangan baru dengan orientasi memperluas partisipasi publik. Undang-undang ini adalah UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain UU ini, juga diterbitkan sejumlah peraturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Sistem perencanaan pembangunan nasional yang baru mewajibkan Pemerintah menyusun dokumen perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang (periode 20 tahun); perencanaan jangka menengah (periode 5 tahun); dan perencanaan jangka pendek (periode 1 tahun). Ketiganya merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah dalam menyusun rencana kerja instansi pemerintah.

Secara khusus, setiap dokumen perencanaan ini memiliki materi atau substansi yang berbeda ruang lingkupnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Materi RPJP kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah dokumen perencanaan yang lebih operasional, seperti RPJM, Renstra-SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja SKPD.

Berdasarkan muatan yang terkandung dalam dokumen perencanaan tersebut, RPJP Daerah pada dasarnya merupakan dokumen yang memiliki nilai strategis karena memuat rencana pembangunan daerah untuk merealisasikan visi dan misi daerah. Materi RPJP ini menjadi dokumen publik yang dapat digunakan untuk menguji kinerja Pemerintah Daerah dalam menjabarkan visi dan misi tersebut, sekaligus menjadi indikator untuk menguji konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan komitmen seluruh *stakeholders*.

Karena merupakan dokumen strategis daerah, maka seyogianya RPJP Daerah memuat gambaran kondisi umum daerah secara obyektif yang berisi data geografis, demografis, sosial, budaya, ekonomi, dan tata ruang daerah sebagai basis data dalam analisis kebutuhan daerah. Pengumpulan data ini seringkali hanya menjadi pelengkap dalam kegiatan penyusunan RPJP Daerah, padahal ketersediaan data yang obyektif, valid, dan aktual bernilai strategis agar rencana yang disusun pun tidak menyimpang dari kondisi riil daerah. Salahsatu keberhasilan dalam penyusunan rencana pembangunan ditentukan oleh data *input* yang menjadi dasar analisis, karena bila data *input* dibuat dengan seadanya tentunya hasil akhir (*output*) perencanaan pun tidak akan berdaya guna.

Berdasarkan kerangka pemikiran ini, maka perlu dilakukan kajian mengenai kondisi umum Kabupaten Cirebon selama 5 (lima) tahun terakhir (2000 sampai dengan 2005) sebagai bahan analisis untuk memetakan berbagai perkembangan dan kecenderungan yang dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Cirebon.

1.2 Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah atau disingkat RPJP daerah Kabupaten Cirebon adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Jawa Barat nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025, yang memuat visi, misi, dan

pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun sejak Tahun 2005 sampai dengan 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disingkat RPJP Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005–2025 ditetapkan dengan maksud:

1. Memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Cirebon (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama baik pada tataran level Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa barat maupun Nasional.
2. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon.
3. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon.

Tujuan penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 – 2025 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Cirebon.
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah perbatasan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah.
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi kabupaten, provinsi maupun nasional.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

1.4 Landasan Hukum

Landasan idiil RPJP Daerah Kabupaten Cirebon adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

1.5 Tata Urut

RPJP Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 disusun dengan urutan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang memuat pengantar, pengertian, maksud dan tujuan, landasan hukum, tata urut serta kerangka pikir.
- Bab II Kondisi umum yang memuat penjelasan mengenai kondisi sampai dengan titik awal penyusunan RPJP Daerah dalam setiap sektor pembangunan serta tantangan yang akan dihadapi selama 20 tahun ke depan dan modal dasar.
- Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2005-2025, yang memuat visi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.
- Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang memuat upaya-upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Cirebon.
- Bab V Penutup.

1.6 Kerangka Pikir

Pembangunan saat ini merupakan kelanjutan pembangunan era reformasi dan penguatan implementasi otonomi daerah, sehingga harus berpihak kepada masyarakat, pelayanan pemerintahan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip “good local government” yaitu sikap pemerintahan yang partisipatif, transparan, demokratis, menjunjung hak masyarakat, terbuka, taat hukum dan seterusnya. Hal tersebut sangat relevan dalam membangun situasi, kondisi dan budaya masyarakat sekaligus untuk menangkal budaya luar yang dapat merusak budaya lokal.

Kondisi geografis dan luas wilayah Kabupaten Cirebon merupakan hal yang strategis dalam membangun masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Oleh sebab itu dalam RPJPD ini kondisi sosial, budaya dan fisik lingkungan Kabupaten Cirebon menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan.

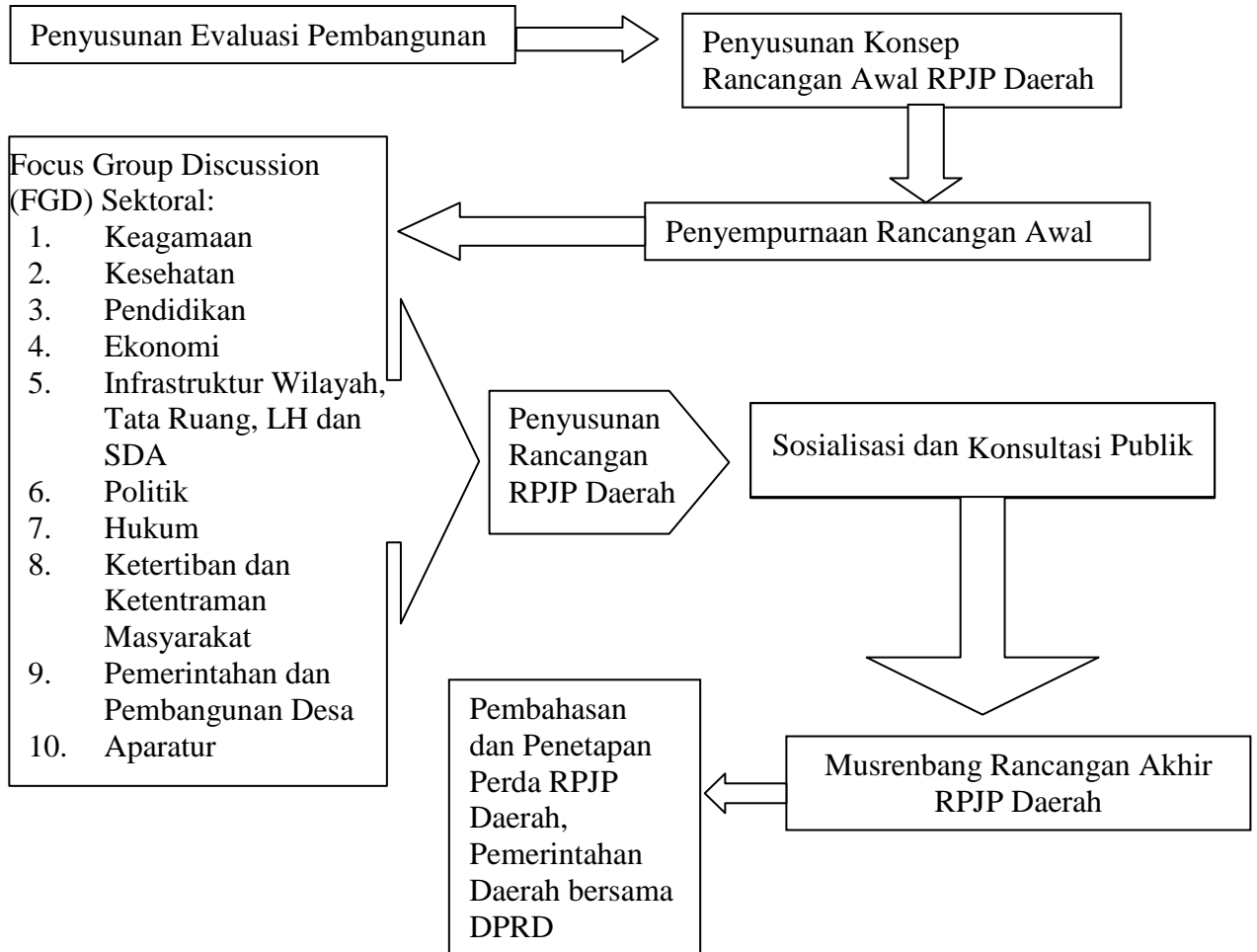
1.7 Proses Penyusunan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Cirebon disusun melalui pendekatan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi / estimasi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan Kabupaten Cirebon.

Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 melalui berbagai tahap dialog sektoral maupun dialog umum yang melibatkan stakeholder kunci dari pihak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat.

Penyusunan dokumen RPJP Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 juga telah melalui tahap konsultasi publik, sosialisasi serta penjangkaran aspirasi masyarakat dengan cara penyebaran angket dalam FGD (*Focus Group Discussion*) dalam beberapa waktu ke belakang.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2005-2025



BAB II

KONDISI UMUM KABUPATEN CIREBON

2.1. Kondisi Saat Ini

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat di bagian Timur sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Daerah ini mempunyai posisi sangat strategis sebagai bagian dari jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Daerah ini memiliki luas wilayah 990,36 Km².

1. Letak Wilayah

Kabupaten Cirebon terletak diantara 06°30' sampai dengan 07° 00' Lintang Selatan (LS) dan diantara 108°20' sampai dengan 108°50' Bujur Timur (BT). Jarak terjauh dari arah Barat ke Timur sepanjang 54 Km dan Utara ke Selatan sepanjang 39 km. Adapun batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa
Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan
Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka
Sebelah Timur : Kabupaten Brebes (Provinsi Jawa Tengah)

2. Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan

a. Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan.

b. Administrasi Pembangunan

Berdasarkan Perda Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2005 Tentang RTRW Kabupaten Cirebon, Pusat Pelayanan di daerah dibentuk dalam 4 hirarki, yaitu :

- Pusat Wilayah Pengembangan adalah Sumber sebagai pusat pelayanan bagi Wilayah daerah.
- Pusat Sub Wilayah Pengembangan adalah Ciledug, Lemahabang, Sumber, Palimanan, dan Arjawinangun sebagai pusat pelayanan bagi kecamatan lain dalam Sub Wilayah Pengembangan.
- Penunjang Pusat Sub Wilayah Pengembangan adalah Losari, Astanajapura, Weru, Klangeran, dan Gegesik sebagai pusat pelayanan bagi kecamatan lain dalam Sub Wilayah Pengembangan.
- Pusat Pengembangan Kecamatan adalah Kecamatan Waled, Pabedilan, Babakan, Gebang, Karang Sembung, Susukan Lebak, Sedong, Beber, Mundu, Pangenan, Cirebon Selatan, Cirebon Utara, Dukupuntang, Depok, Plumbon, Ciwaringin, Susukan, Kaliwedi, Panguragan, Kapetakan, Kedawung, Tengahtani, Gempol, Karang Wareng, Plred, Pabuaran dan Pasaleman sebagai pusat pelayanan bagi desa-desa dalam lingkup kecamatan.

3. Keadaan Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi *Schmidt* dan *Ferguson* keadaan iklim di Kabupaten Cirebon termasuk tipe B/C (Q=56,06%). Tipe ini memiliki rata-rata bulan kering 3,7 dan rata-rata bulan basah 6,6. Tipe ini termasuk golongan daerah beriklim sedang-hujan dengan curah hujan rata-rata 1.500 – 4.000 mm pertahun.

Suhu tertinggi mencapai 33°C dan suhu terendah sekitar 24°C dengan suhu rata-rata 28°C. Kisaran suhu sebesar itu dikategorikan sebagai daerah tropis. Wilayah Cirebon juga dipengaruhi oleh Angin Kumbang yang bersifat kering.

4. Keadaan Hidrologi

Sumber-sumber air yang ada di Kabupaten Cirebon berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Sumber air permukaan berasal dari beberapa sungai besar seperti : Sungai Cisanggarung, Sungai

Ciwaringin, Sungai Cimanis, Sungai Cipager, Sungai Kumpul Kuista dan Sungai Jamblang. Selain itu terdapat sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari sungai-sungai besar yang berhulu di bagian Selatan. Sungai-sungai besar yang ada membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Cisanggarung dan DAS Cimanuk Hilir.

5. Keadaan Topografi

Wilayah Kabupaten Cirebon dibagian Utara memiliki ketinggian antara 0-25 meter diatas permukaan air laut (dpl) dengan luas 64.636 Ha. Sedangkan dibagian Selatan mempunyai ketinggian antara 25-200 meter dpl dengan luas wilayah 82.871,6 Ha.

Sedangkan berdasarkan kemiringannya wilayah Kabupaten Cirebon dikelompokkan menjadi enam kelompok, yaitu :

- 1) Daerah datar. Daerah ini memiliki kemiringan tanah antara 0% - 3% dengan luas 77.670 Ha atau 78,43% dari luas wilayah kabupaten.
- 2) Daerah landai I. Daerah ini memiliki kemiringan antara 3% - 8% dengan luas 5.500 Ha atau 5,55% dari luas wilayah kabupaten.
- 3) Daerah Landai II. Daerah ini memiliki kemiringan antara 8% - 15% dengan luas 4.000 Ha atau 4,04% dari luas wilayah kabupaten.
- 4) Daerah Miring I. Daerah ini memiliki kemiringan antara 15% - 25% dengan luas 5.800 Ha atau 5,86% dari luas wilayah kabupaten.
- 5) Daerah Miring II. Daerah ini memiliki kemiringan antara 25% - 40% dengan luas 4.200 Ha atau 4,24 % dari luas wilayah kabupaten.
- 6) Daerah Terjal. Daerah ini memiliki kemiringan diatas 40% dengan luas 1.866 Ha atau 1,88% dari luas wilayah kabupaten.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan manusia yang dijadikan sebagai ukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon. IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan (IP), Indeks Kesehatan (IK), dan Indeks Daya Beli (IDB).

Pada Tahun 2007 angka IPM Kabupaten Cirebon mencapai angka 67,30. Angka ini meningkat sebesar 0,98 poin dibandingkan Tahun 2006 yaitu sebesar 66,32. Dalam rentang waktu Tahun 2003 – 2007, IPM Kabupaten Cirebon meningkat sebesar 4,30 dari angka 63,00 pada Tahun 2003 menjadi 67,30 pada Tahun 2007 atau rata-rata capaian angka IPM sebesar 1,075 poin per tahun. Untuk lebih jelas dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| No | Keterangan | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 ^{*)} |
|----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1 | Indeks Kesehatan | 64,17 | 65,78 | 66,30 | 66,33 | 66,53 |
| 2 | Indeks Pendidikan | 72,74 | 73,49 | 74,05 | 72,56 | 74,71 |
| 3 | Indeks Daya Beli | 52,09 | 52,63 | 53,39 | 60,07 | 60,67 |
| | IPM | 63,00 | 63,97 | 64,58 | 66,32 | 67,30 |

Sumber : BPS Pusat, 2008

Pelaksanaan program pembangunan daerah meliputi bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur wilayah, tata ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, politik, hukum, ketertiban dan ketentraman masyarakat, pemerintahan dan pembangunan desa, dan aparatur telah mencapai kemajuan :

2.1.1 Keagamaan

Pembangunan bidang keagamaan selama Tahun 2003-2007 bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, yaitu membangun masyarakat agamis melalui basis keluarga, masyarakat dan organisasi keagamaan serta lembaga pendidikan formal dan non formal.

Selama Tahun 2003 hingga Tahun 2007 kondisi kerukunan intern umat beragama maupun antar umat beragama menunjukkan kondisi yang baik. Rasio penyediaan sarana peribadatan pada Tahun 2003 sebesar 0,0004 sedangkan pada Tahun 2007 sebesar 0,00033. Selama Tahun

2003-2007 ada penurunan jumlah sarana peribadatan terutama jumlah masjid pada Tahun 2005 sebesar 164 masjid.

Tabel 2.2
Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Masjid | 675 | 681 | 687 | 689 | 691 |
| Mushollah | 5.511 | 5.661 | 5.731 | 5.815 | 5.845 |
| Gereja Protestan | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Gereja Katolik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pura/Klenteng/Vihara | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Jumlah | 6.194 | 6.350 | 6.426 | 6.512 | 6.546 |
| Rasio | 3,044 | 3,046 | 3,049 | 3,051 | 3,054 |

Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007

2.1.2 Kesehatan

1. Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah kenaikan Angka harapan Hidup (AHH). Selama periode Tahun 2003-2007 telah berhasil meningkatkan AHH dari 63,50 tahun pada Tahun 2003 menjadi 64,92 tahun pada Tahun 2007. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan umur harapan hidup sebesar 1,42 tahun selama lima tahun.

Tabel 2.3
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun) | 63,50 | 64,47 | 64,78 | 64,80 | 64,92 |

Sumber : BPS Pusat 2007

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Indikator lain yang mencerminkan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB). Angka kematian bayi di Kabupaten Cirebon cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2003 angka kematian bayi di Kabupaten Cirebon sebesar 55,00 bayi per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan pada Tahun 2004 angka kematian bayi sebesar 54,46 bayi dan pada Tahun 2007 angka kematian bayi menurun menjadi 53,08 bayi per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.4
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Angka Kematian Bayi (AKB) | 55,00 | 54,46 | 53,05 | 53,00 | 53,08 |

Sumber : Bapeda Kabupaten Cirebon 2007

3. Balita Penderita Gizi Buruk

Kabupaten Cirebon merupakan daerah rawan gizi. Jumlah balita penderita gizi buruk selama Tahun 2003-2007 mengalami fluktuasi. Jumlah balita penderita gizi buruk mengalami penurunan dari 4.484 balita pada Tahun 2003 dan menjadi 3.331 balita pada Tahun 2006. Namun pada Tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi 3.732 balita. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.5** dibawah ini.

Tabel 2.5
Prosentase Penderita Gizi Buruk Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Prosentase balita penderita gizi buruk (%) | 2,47 | 2,34 | 2,15 | 1,92 | 2,17 |
| Balita penderita gizi buruk (orang) | 4.484 | 4.005 | 3.709 | 3.331 | 3.732 |

Sumber : Bapeda Kabupaten Cirebon 2007

4. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk

Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat berusaha ditingkatkan melalui penambahan sarana kesehatan. Rasio jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu dibandingkan dengan jumlah penduduk menunjukkan tingkat ketersediaan sarana kesehatan dalam setiap 1.000 penduduk. Pada Tahun 2003 rasio jumlah rumah sakit sebesar 0,025. Ini berarti bahwa setiap 400.000 jiwa dapat dilayani oleh 1 rumah sakit. Sedangkan rasio pada Tahun 2007 menjadi 0,033. Ini berarti bahwa setiap 303.030 jiwa dapat dilayani oleh 1 rumah sakit. Adapun rasio puskesmas dan pustu per satuan penduduk pada Tahun 2003 masing-masing sebesar 0,0555 dan pada Tahun 2007 menjadi sebesar 0,0555. Ini artinya bahwa pada Tahun 2003 setiap 18.009 jiwa dapat dilayani oleh 1 puskesmas/pustu. Sedangkan pada Tahun 2007 setiap 18.012 jiwa dapat dilayani oleh 1 puskesmas/pustu. Secara rasio Tahun 2003 dengan Tahun 2007 menunjukkan angka yang tetap. Tetapi berdasarkan jumlah puskesmas menunjukkan jumlah yang bertambah seiring dengan penambahan penduduk.

Tabel 2.6
Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk Tahun 2003-2007

| Tahun | Sarana Kesehatan | | | Puskesmas + Pustu | Jml penduduk | Rasio | | | |
|-------|------------------|-----------|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------|-------|------------------|
| | Rmh Sakit | Puskesmas | Pustu | | | Rumah Sakit | Puskesmas | Pustu | Puskesmas+ Pustu |
| 2003 | 5 | 44 | 69 | 113 | 2035100 | 0,025 | 0,022 | 0,034 | 0.0555 |
| 2004 | 5 | 44 | 69 | 113 | 2084572 | 0,024 | 0,021 | 0,033 | 0.0542 |
| 2005 | 5 | 53 | 63 | 116 | 2107918 | 0,024 | 0,025 | 0,030 | 0.0550 |
| 2006 | 7 | 53 | 64 | 117 | 2134656 | 0,033 | 0,025 | 0,030 | 0.0548 |
| 2007 | 7 | 53 | 66 | 119 | 2143545 | 0,033 | 0,025 | 0,031 | 0.0555 |

Sumber: Dinas Kesehatan dan Bapeda 2007

5. Rasio Dokter dan Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk

Peningkatan pelayanan kesehatan melalui penambahan jumlah tenaga kesehatan khususnya jumlah dokter mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Tabel 2.7
Rasio Dokter dan Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk
Tahun 2003-2007

| Tahun | Tenaga Kesehatan | | Jumlah Penduduk | Rasio | |
|-------|------------------|------------------|-----------------|--------|------------------|
| | Dokter | Tenaga Paramedis | | Dokter | Tenaga Paramedis |
| 2003 | 147 | 1416 | 2.035.100 | 0,072 | 0,696 |
| 2004 | 146 | 1178 | 2.084.572 | 0,071 | 0,565 |
| 2005 | 201 | 2071 | 2.107.918 | 0,095 | 0,982 |
| 2006 | 248 | 2189 | 2.134.656 | 0,116 | 1,025 |
| 2007 | 214 | 2048 | 2.143.545 | 0,100 | 0,955 |

Sumber: Dinas Kesehatan dan Bapeda 2007

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2003 setiap 1 dokter melayani penduduk sebanyak 13.844 jiwa dan setiap 1 tenaga paramedis melayani penduduk sebanyak 1.437 jiwa. Sedangkan pada Tahun 2007 setiap 1 orang dokter melayani penduduk sebanyak 10.016 jiwa. Sedangkan setiap 1 orang tenaga paramedis melayani penduduk sebanyak 1.046 jiwa.

2.1.3 Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pembangunan pendidikan bagi anak usia dini, penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas), pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah. Untuk melaksanakan pembangunan pendidikan selama Tahun 2003-2007 alokasi anggaran pendidikan sebesar rata-rata 35% termasuk belanja tidak langsung.

1. Ketersediaan Sekolah, Guru dan Murid

a. Tingkat Pendidikan Dasar :

Penunjang keberhasilan pelayanan dasar bidang pendidikan ditentukan oleh ketersediaan gedung sekolah dan guru. Tingkat kualitas pembelajaran ditentukan oleh tingkat rasio antara guru dan murid. Rasio penyediaan sarana sekolah dasar dan penduduk usia sekolah dasar selama periode Tahun 2003-2007 cenderung menurun yaitu dari rasio 38 pada Tahun 2003. Ini berarti bahwa setiap 10.000 penduduk usia sekolah dasar dilayani oleh 38 sekolah dasar. Sedangkan rasio pada Tahun 2007 menjadi 36. Ini berarti bahwa setiap 10.000 penduduk usia sekolah dasar dilayani oleh 36 sekolah.

Tabel 2.8
Rasio Sekolah Pendidikan Dasar dengan Jumlah Penduduk Usia
Pendidikan Dasar di Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| Tahun | Jumlah | | Rasio |
|-------|------------------------------------|----------------------------|-------|
| | Sekolah Pendidikan Dasar (unit) | Penduduk Usia SD (jiwa) | |
| 2003 | 1.052 | 279.041 | 38 |
| 2004 | 1.045 | 282.134 | 37 |
| 2005 | 1.038 | 291.883 | 36 |
| 2006 | 1.040 | 288.744 | 36 |
| 2007 | 1.031 | 288.474 | 36 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Bapeda Kab. Cirebon 2007

Selama kurun waktu Tahun 2003-2007 rasio guru dan murid belum mencapai kondisi yang ideal. Rasio antara guru dan murid di tingkat sekolah dasar mengalami fluktuasi. Jumlah guru cenderung menurun dari Tahun 2003-2007. Pada Tahun 2003 rasio guru terhadap jumlah murid sebesar 39. Ini berarti bahwa setiap 1.000 murid dapat dilayani oleh 39 guru. Sedangkan pada tahun 2007 rasio guru terhadap murid sebesar 32. Ini berarti bahwa setiap 1.000 murid dapat dilayani oleh 32 guru. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.9** dibawah ini.

Tabel 2.9
Rasio Guru Pendidikan Dasar dengan
Jumlah Murid Pendidikan Dasar di Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| Tahun | Jumlah | | Rasio |
|-------|-------------------------------|------------------|-------|
| | Guru Pendidikan Dasar (orang) | Murid SD (orang) | |
| 2003 | 10.566 | 269.565 | 39 |
| 2004 | 10.853 | 273.878 | 40 |
| 2005 | 8.030 | 266.338 | 30 |
| 2006 | 9.664 | 269.629 | 36 |
| 2007 | 8.540 | 270.146 | 32 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Cirebon 2008

b. Tingkat Pendidikan Menengah

Selama Tahun 2003-2007 rasio penyediaan sarana SMP dengan penduduk usia SMP mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2003 rasio sekolah terhadap penduduk usia SMP sebesar 10. Ini berarti bahwa setiap 10 unit sekolah dapat menampung sebanyak 10.000 murid. Sedangkan pada Tahun 2007 setiap 16 unit sekolah dapat menampung sebanyak 10.000 murid. Dengan demikian dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007 terjadi kenaikan rasio.

Dilihat dari jumlah sarana sekolah mengalami kenaikan dari Tahun 2003-2007 sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2.10** dibawah ini.

Tabel 2.10
Rasio Sekolah dengan Penduduk Usia SMP
di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007

| Tahun | Jumlah | | Rasio |
|-------|-------------------------------|--------------------------|-------|
| | Sekolah pendidikan SMP (unit) | Penduduk usia SMP (jiwa) | |
| 2003 | 193 | 190.700 | 10 |
| 2004 | 199 | 291.883 | 7 |
| 2005 | 208 | 118.344 | 18 |
| 2006 | 210 | 131.663 | 16 |
| 2007 | 216 | 262.218 | 16 |

Sumber: Dinas pendidikan dan Bapeda Kab. Cirebon 2007

Selama Tahun 2003-2007 jumlah guru SMP semakin bertambah seiring dengan penambahan jumlah murid. Namun jumlah penambahan

murid tidak seimbang dengan penambahan jumlah guru. Pada Tahun 2003 menunjukkan rasio guru terhadap murid SMP sebesar 58. Ini berarti bahwa setiap 1000 murid dapat dilayani oleh 58 guru. Sedangkan pada Tahun 2007 menunjukkan rasio 49. Ini berarti bahwa setiap 1000 murid dapat dilayani oleh 49 guru.

Dilihat secara rasio guru SMP dengan murid SMP cenderung mengalami perbaikan sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2.11** dibawah ini.

Tabel 2.11
Rasio Guru dengan Murid SMP di Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| Tahun | Jumlah | | Rasio |
|-------|-----------------------------|------------------|-------|
| | Guru Pendidikan SMP (orang) | Murid SMP (jiwa) | |
| 2003 | 4.933 | 85.596 | 58 |
| 2004 | 4.821 | 86.052 | 56 |
| 2005 | 5.048 | 87.859 | 57 |
| 2006 | 5.203 | 94.021 | 55 |
| 2007 | 5.248 | 107.276 | 49 |

Sumber: Dinas pendidikan 2007

Selama Tahun 2003-2007 Jumlah sarana SMA cenderung semakin bertambah. Pada Tahun 2003 berjumlah 118 unit dan pada Tahun 2007 sebanyak 136 unit. Pada Tahun 2003 rasio sekolah terhadap penduduk usia SMA sebesar 7. Ini berarti bahwa setiap 7 unit sekolah dapat menampung sebanyak 10.000 murid. Sedangkan pada Tahun 2007 setiap 11 unit sekolah dapat menampung sebanyak 10.000 murid sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2.12** dibawah ini.

Tabel 2.12
Rasio Sekolah dengan Penduduk Usia SMA di Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| Tahun | Jumlah | | Rasio |
|-------|-------------------------------|--------------------------|-------|
| | Sekolah Pendidikan SMA (unit) | Penduduk usia SMA (jiwa) | |
| 2003 | 118 | 164,356 | 7 |
| 2004 | 123 | 288,744 | 4 |
| 2005 | 125 | 129,601 | 10 |
| 2006 | 127 | 127,152 | 10 |
| 2007 | 136 | 250,492 | 11 |

Sumber: Dinas pendidikan dan Bapeda Kab. Cirebon 2007

Selama Tahun 2003-2007 rasio guru terhadap murid SMA mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2003 menunjukkan rasio guru terhadap murid SMA sebesar 74. Ini berarti bahwa setiap 1000 murid dapat dilayani oleh 74 guru. Sedangkan pada Tahun 2007 menunjukkan rasio 71. Ini berarti bahwa setiap 1000 murid dapat dilayani oleh 71 guru. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.13** dibawah ini.

Tabel 2.13
Rasio Guru dengan Murid SMA di Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| Tahun | Jumlah | | Rasio |
|-------|-----------------------------|------------------|-------|
| | Guru Pendidikan SMA (orang) | Murid SMA (jiwa) | |
| 2003 | 3,131 | 42,501 | 74 |
| 2004 | 3,175 | 42,940 | 74 |
| 2005 | 3,807 | 43,322 | 88 |
| 2006 | 4,044 | 43,896 | 92 |
| 2007 | 3,371 | 47.621 | 71 |

Sumber : Dinas pendidikan Kab. Cirebon 2007

2. Angka Partisipasi

Indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat juga dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagaimana diuraikan pada **Tabel 2.14**.

Tabel 2.14
APK dan APM Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| TAHUN | APK | | | APM | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | SD | SMP | SMA | SD | SMP | SMA |
| 2003 | 101,28 | 80,40 | 47,21 | 94,97 | 70,14 | 41,12 |
| 2004 | 99,66 | 80,44 | 47,36 | 95,23 | 70,95 | 41,14 |
| 2005 | 99,84 | 75,88 | 39,78 | 94,71 | 66,72 | 34,52 |
| 2006 | 101,26 | 72,88 | 43,79 | 94,79 | 66,25 | 39,26 |
| 2007 | 101,60 | 73,99 | 48,17 | 94,89 | 66,86 | 35,19 |

Sumber : Bapeda Kabupaten Cirebon 2007

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan bidang pendidikan adalah Indeks Pendidikan (IP) yang terdiri dari komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH).

Pada Tahun 2003 capaian RLS sebesar 6,14 tahun atau baru mencapai tamat sekolah dasar. Pada Tahun 2007 capaian RLS meningkat menjadi 6,42 tahun. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,28 tahun. Capaian rata-rata RLS selama kurun waktu lima tahun sebesar 6,32 per tahun Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.15**.

Tabel 2.15
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun) | 6,14 | 6,45 | 6,52 | 6,10 | 6,42 |

Sumber : BPS Pusat 2007

Pada Tahun 2003 capaian AMH sebesar 88,64%. Sedangkan pada Tahun 2007 menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 90,66%. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 2,02%. Capaian rata-rata AMH selama kurun waktu lima tahun sebesar 89,18% per tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.16**.

Tabel 2.16
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Angka Melek Huruf (AMH) (%) | 88,64 | 88,73 | 89,34 | 88,51 | 90,66 |

Sumber : Bapeda Kabupaten Cirebon, Tahun 2007.

2.1.4 Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat ditunjukkan melalui kondisi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) dalam kurun waktu Tahun 2003-2007. Pada Tahun 2003 PDRB ADHB Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 7.212.396.710.000 meningkat menjadi sebesar Rp. 12.930.228.360.000 pada Tahun 2007. Sedangkan berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) pada Tahun 2003 sebesar Rp 5.768.836.080.000 dan meningkat menjadi sebesar Rp 7.028.263.790.000 pada Tahun 2007. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Cirebon selama Tahun 2003-2007 mengalami pertumbuhan rata-rata mencapai angka 4,86 % per tahun.

Tabel 2.17
PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| PDRB Harga Berlaku (trilyun) | 7,2 | 7,9 | 9,9 | 11,4 | 12,9 |
| PDRB Harga Konstan (trilyun) | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,0 |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 4,04 | 4,67 | 5,06 | 5,14 | 5,37 |

Sumber : BPS Kab. Cirebon 2007

2. Tingkat Inflasi

Selama kurun waktu Tahun 2003-2007 terjadi inflasi di Kabupaten Cirebon rata-rata 8,58% per tahun. Tingkat inflasi sebesar ini masih dalam katagori *low inflation* atau disebut juga inflasi satu digit. Meskipun tergolong lemah, inflasi di Kabupaten Cirebon telah menyebabkan berbagai permasalahan ekonomi bagi masyarakat pedesaan terutama persoalan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan transportasi. Kenaikan inflasi di Kabupaten Cirebon memacu kenaikan harga seluruh barang dan jasa terutama bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Tabel 2.18
Tingkat Inflasi Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

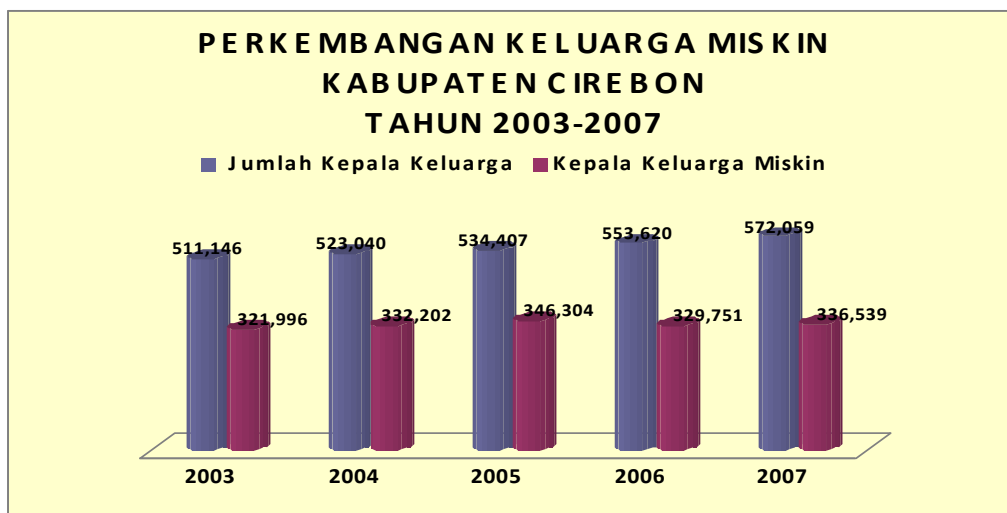
| URAIAN | TAHUN | | | | |
|---------------------|-------|------|-------|------|------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Tingkat Inflasi (%) | 1,82 | 5,08 | 19,25 | 9,95 | 6,80 |

Sumber : BPS Kab. Cirebon 2007

3. Kemiskinan

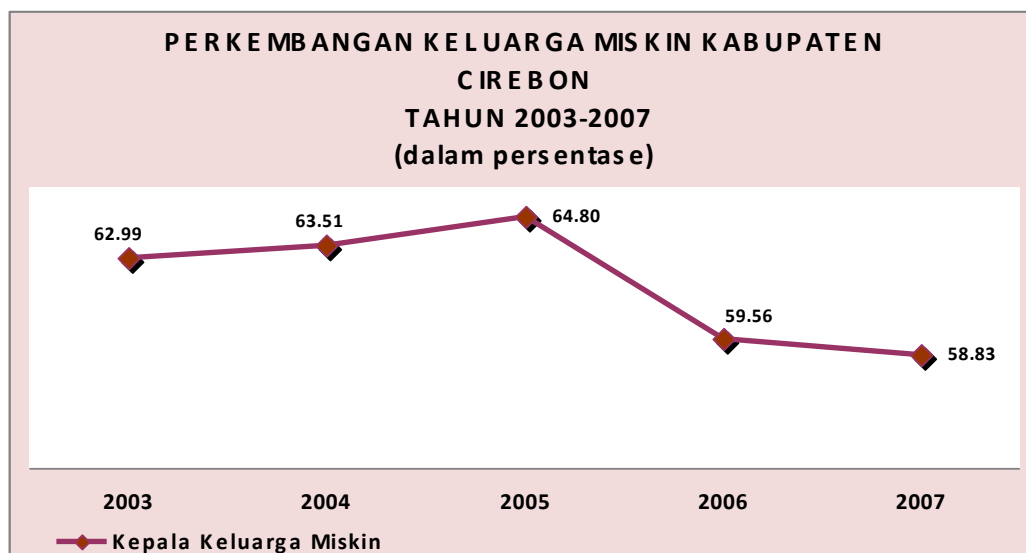
Dilihat dari jumlah keluarga miskin pada Tahun 2003 jumlah keluarga miskin sebanyak 62,99 % bergerak menurun hingga menjadi 58,83 % pada Tahun 2007. Namun bila diperhatikan dari proporsi atau besaran dari jumlah keluarga miskin mengalami peningkatan dan secara rata-rata jumlah keluarga miskin sebanyak 61,94% setiap tahun dari jumlah keluarga yang ada. Hal ini mencerminkan bahwa keluarga miskin di Kabupaten Cirebon masih tergolong sangat besar, melebihi setengah dari penduduk Kabupaten Cirebon.

Gambar 2.1
Perkembangan Keluarga Miskin Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007



Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007

Gambar 2.2
Perkembangan Keluarga Miskin Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007 (dalam prosentase)



Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007

Penyandang masalah sosial yang menjadi garapan pembangunan periode Tahun 2003-2007 mencakup berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan social untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah

dan mengatasi masalah social serta memperkuat kelembagaan sosial. Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat diindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2003-2007 jumlah PMKS mencapai 237.600 PMKS. Dari jumlah PMKS tersebut, 52,40% didominasi oleh masalah fakir miskin, sementara masalah anak terlantar dan lanjut usia terlantar masing-masing sebesar 21,82% dan 9,2%. Berdasarkan kondisi tersebut tentunya upaya untuk meningkatkan penggalian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong pemulihan PMKS untuk kembali berperan dan berfungsi di masyarakat sesuai dengan fungsi sosialnya.

Tabel 2. 19
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Di Kabupaten Cirebon Tahun 2004 dan 2006

| No | JENIS | 2004 | 2006 |
|----|---|----------------|----------------|
| 1 | Balita Terlantar | 2.463 | 6.638 |
| 2 | Anak Terlantar | 21.987 | 45.205 |
| 3 | Anak Korban Tindak Kekerasan atau di perlakukan salah | 184 | 209 |
| 4 | Anak nakal | 854 | 396 |
| 5 | Anak Jalanan | 805 | 1.253 |
| 6 | Anak Cacat | 2.864 | 1.113 |
| 7 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | 9.758 | 15.239 |
| 8 | Wanita Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah | 157 | 238 |
| 9 | Lanjut Usia Terlantar | 9.684 | 21.861 |
| 10 | Lanjut usia korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | 132 | 345 |
| 11 | Penyandang Cacat | 5.781 | 3.905 |
| 12 | Penyandang Cacat bekas Penderita penyakit kronis | 1.711 | 1.001 |
| 13 | Tuna Susila | 310 | 39 |
| 14 | Pengemis | 501 | 179 |
| 15 | Gelandangan | 175 | 925 |
| 16 | Bekas Narapidana | 801 | 419 |
| 17 | Korban Penyalah gunaan NAPZA | 2.664 | 84 |
| 18 | Keluarga Fakir miskin | 67.816 | 124.505 |
| 19 | Keluarga Berumah Tak layak huni | 10.614 | 7.861 |
| 20 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | 460 | 965 |
| 21 | Komunitas adat terpencil | - | - |
| 22 | Masyarakat yang tinggal didaerah Rawan bencana | 1.059 | 206 |
| 23 | Korban Bencana alam | 206 | 87 |
| 24 | Korban Bencana Sosial | 233 | 181 |
| 25 | Pekerja Migran | 859 | 297 |
| 26 | HIV/AIDS | 51 | 2 |
| 27 | Keluarga Rentan | - | 1.095 |
| | JUMLAH | 142.109 | 237.600 |

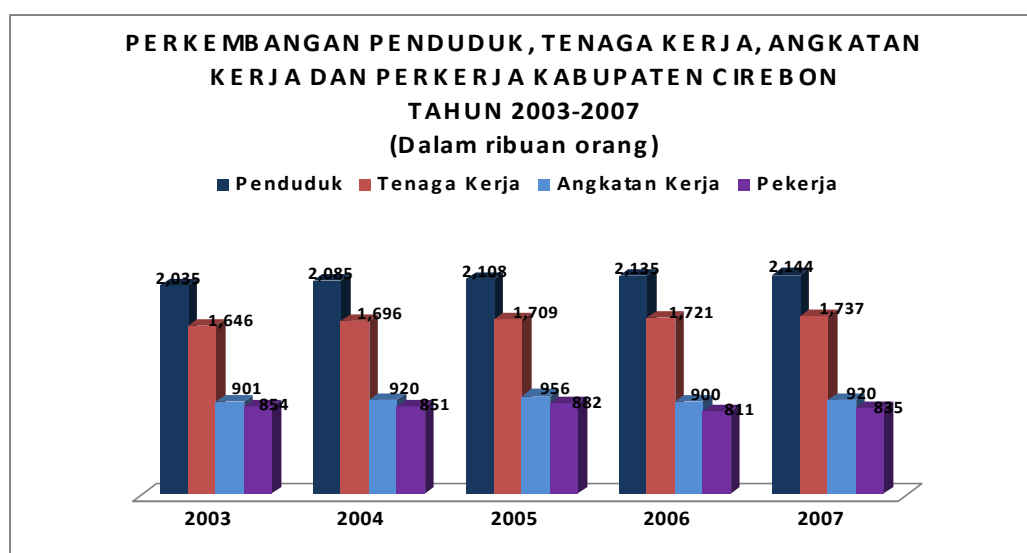
Sumber : Dinas Sosial Kab. Cirebon 2008

4. Ketenagakerjaan

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

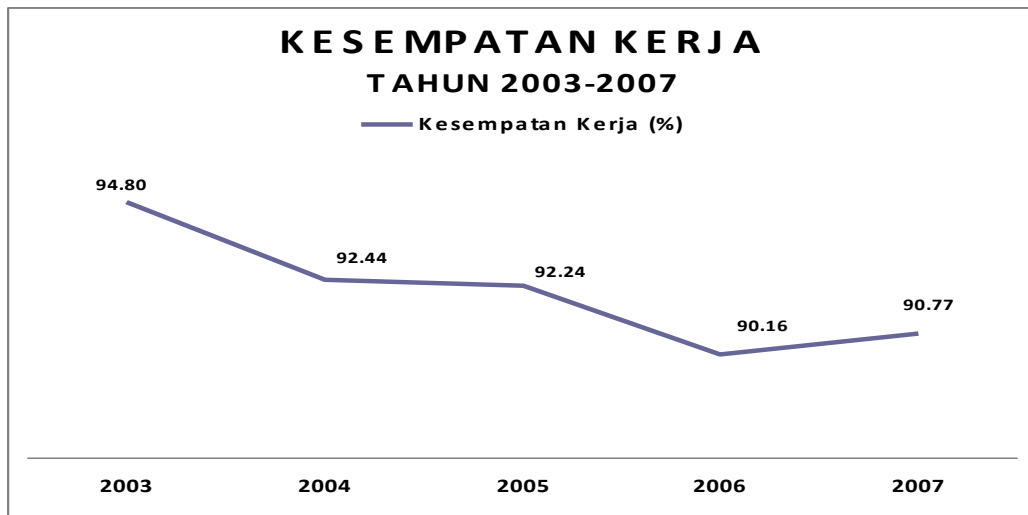
Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perkembangan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon selama lima tahun terakhir (Tahun 2003-2007) terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 2,26% per tahun. Penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja (pekerja dan pencari kerja) mengalami penambahan setiap tahunnya rata-rata 1,87%, sedangkan peningkatan penduduk yang terserap dalam lapangan pekerjaan (pekerja) rata-rata sebesar 92,08% per tahun dengan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2007 sebesar 9,23%.

Gambar 2.3
Perkembangan Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja dan Pekerja di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 (dalam ribuan)



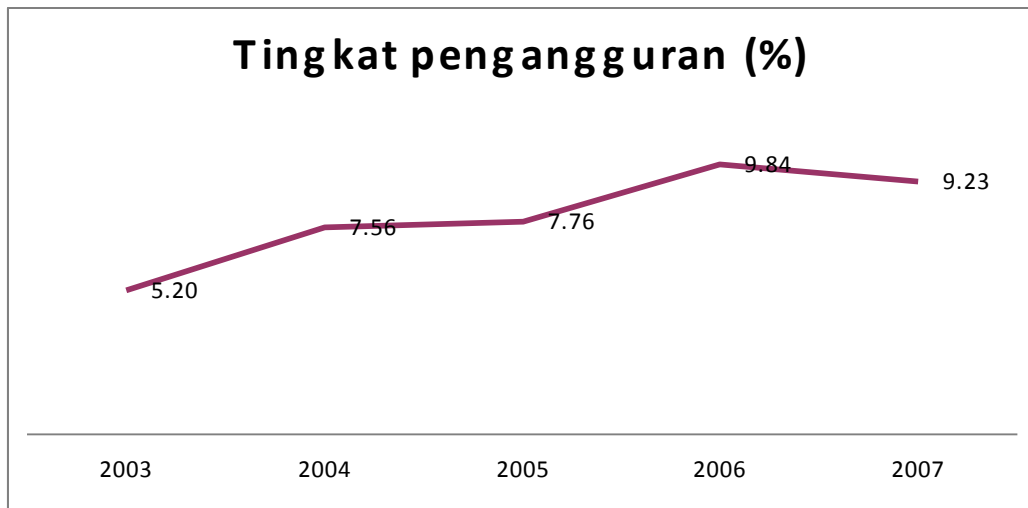
Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007

Gambar 2.4.
Grafik Kesempatan Kerja di Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007



Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007

Gambar 2.5.
Grafik Tingkat Pengangguran di Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007



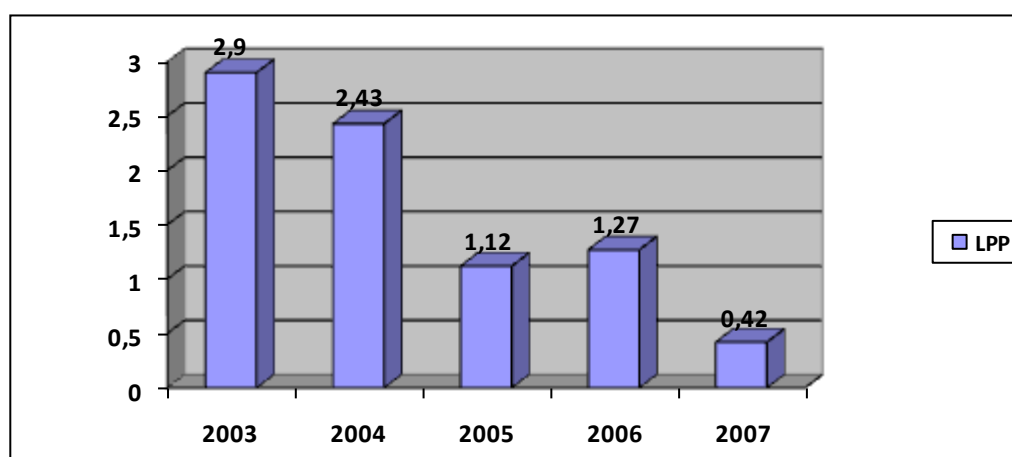
Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007

5. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Berdasarkan tingkat laju pertumbuhan penduduknya, pada Tahun 2007 Kabupaten Cirebon memiliki LPP sebesar 0,42 persen. Apabila kita melihat perkembangan LPP selama periode Tahun 2003-2007

menunjukkan relatif adanya penurunan pertumbuhan yaitu dari sebesar 2,9 persen pada Tahun 2003 menjadi 0,42 persen pada Tahun 2007 atau rata-rata pertumbuhan sebesar 1,63 persen pertahun. Angka pertumbuhan ini secara umum dipengaruhi oleh tiga faktor penentu yakni, Kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan penduduk (migrasi).

Gambar 2.6
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007



Sumber: Bapeda Kabupaten Cirebon, 2007

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Cirebon menurut jenis kelamin untuk kurun Tahun 2003 hingga Tahun 2007 dapat digambarkan pada **Tabel 2.20** berikut ini.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2003 – 2007

| Jenis Kelamin | 2003 (jiwa) | 2004 (jiwa) | 2005 (jiwa) | 2006 (jiwa) | 2007 (jiwa) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laki-laki | 1.032.596 | 1.063.348 | 1.061.252 | 1.052.676 | 1.081.067 |
| Perempuan | 1.002.504 | 1.021.224 | 1.046.666 | 1.081.980 | 1.062.478 |
| Jumlah | 2.035.100 | 2.084.572 | 2.107.918 | 2.134.656 | 2.143.545 |

Sumber : Bapeda Kabupaten Cirebon, 2007

2.1.5 Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, dan sarana dan prasarana permukiman dan perumahan. Kebutuhan infrastruktur wilayah terkait dengan fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah.

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jaringan jalan berdasarkan kewenangannya dibagi menjadi 5 kriteria status jalan antara lain; jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Sesuai dengan tingkat kewenangannya maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya berkewajiban menangani jalan kabupaten saja. Namun demikian untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi dan kelancaran arus barang dan orang, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengeluarkan kebijakan untuk mengelola jalan poros desa dan jalan desa sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah yang ada.

Sampai dengan saat ini di wilayah Kabupaten Cirebon untuk jalan kabupaten terdapat 158 ruas dengan total panjang mencapai 643,2 km, sehingga memerlukan biaya penanganan yang cukup besar.

Tabel 2.21
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007

| Status Jalan | Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (km) | | | | | Total Panjang (km) |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Nasional | 51,33 | 54,87 | 60,18 | 61,95 | 65,5 | 88,5 |
| Rasio | 0,58 | 0,62 | 0,68 | 0,7 | 0,74 | |
| Provinsi | 29,25 | 31,4 | 35,1 | 37,7 | 41,5 | 53,2 |
| Rasio | 0,55 | 0,59 | 0,66 | 0,71 | 0,78 | |
| Kabupaten | 293,5 | 350,8 | 401,3 | 440,8 | 457,6 | 643,2 |
| Rasio | 0,46 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,71 | |
| Jalan Desa | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 15,66 | 333,42 |
| Rasio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | |
| Jalan Poros Desa | 0 | 0 | 3,17 | 38,81 | 92,19 | 113,65 |
| Rasio | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,34 | 0,81 | |

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon, 2007

Berdasarkan data yang tercantum pada **Tabel 2.21** menunjukkan bahwa kondisi jalan yang dalam keadaan baik di Kabupaten Cirebon setiap tahun semakin meningkat.

2. Rasio Jaringan Irigasi

Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai.

Sebagaimana halnya jaringan jalan, maka untuk prasarana irigasi pun demikian dibagi menjadi beberapa kewenangan dalam hal penanganannya, antara lain; pusat (untuk DI luas > 3.000Ha dan lintas propinsi), propinsi (1.000Ha – 3.000Ha, dan lintas Kabupaten/kota) maupun oleh Kabupaten (luas < 1.000Ha), berikut ini adalah data daerah irigasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang ada di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.22
Data Daerah Irigasi di Wilayah Kabupaten Cirebon

| NO. | DAERAH IRIGASI | LUAS (HA) |
|----------|----------------------------|-----------|
| A | KEWENANGAN PUSAT | |
| 1 | Rentang | 20.620 |
| 2 | Ciwaringin | 1.103 |
| 3 | Seuseupan | 3.897 |
| 4 | Cikesik | 6.024 |
| B | KEWENANGAN PROPINSI | |
| 1 | Walahar | 1.292 |
| 2 | Jamblang | 2.171 |
| 3 | Cipager | 1.056 |
| 4 | Setupatok | 1.396 |
| 5 | Paniis Lebak | 312 |

| | | |
|-----------|-----------------------------|-------|
| 6 | Cibacang | 259 |
| 7 | Cipurut | 134 |
| 8 | Jawa | 111 |
| 9 | Mungkal Gajah | 27 |
| 10 | Katiga | 662 |
| 11 | Ambit | 1.554 |
| | | |
| C | KEWENANGAN KABUPATEN | |
| I. | TEKNIS | |
| 1 | Rajadana | 170 |
| 2 | Jatisawit | 690 |
| 3 | Soka | 282 |
| 4 | Keputon | 446 |
| 5 | Ciparigi | 467 |
| 6 | Panongan | 955 |
| 7 | Ciwado | 839 |
| 8 | Agung | 732 |
| 9 | Kecepat | 477 |
| 10 | Sedong | 168 |
| 11 | Cangkuang | 806 |
| 12 | Tonjong | 107 |
| 13 | Ciwedus | 159 |
| 14 | Sigebang | 182 |
| 15 | Sigong | 99 |
| 16 | Telaga Remis | 90 |
| 17 | Ciliwotan | 64 |
| 18 | Cigobang | 173 |
| 19 | Cirongkob | 64 |
| 20 | Cibuluh | 248 |
| 21 | Suba | 218 |
| 22 | Cirengas | 237 |
| 23 | Situan I | 150 |
| 24 | Situan II | 158 |
| 25 | Soka Udik | 152 |
| 26 | Plester | 72 |
| 27 | Cimanis | 261 |

| | | |
|-----------|------------------------------|-----|
| 28 | Ketos | 263 |
| 29 | Ciawi | 378 |
| II | SEDERHANA/SEMI TEKNIS | |
| 1 | Citelang I | 9 |
| 2 | Citelang II | 4 |
| 3 | Talang | 2 |
| 4 | Loakudang | 113 |
| 5 | Lamping | 2 |
| 6 | Cibatok | 2 |
| 7 | Tamiang | 2 |
| 8 | Sendi | 23 |
| 9 | Leuwi | 3 |
| 10 | Pabrik | 1 |
| 11 | Loa | 24 |
| 12 | Tegal | 64 |
| 13 | Balong | 76 |
| 14 | Cigembor | 18 |
| 15 | Cibiuk | 3 |
| 16 | Umbar | 6 |
| 17 | Cidahu | 5 |
| 18 | Citeureup | 2 |
| 19 | Cidamar | 4 |
| 20 | Cigolempang | 40 |
| 21 | Rancatunggal | 10 |
| 22 | Dalem | 96 |
| 23 | Mandalangit | 46 |
| 24 | Harikukun | 23 |
| 25 | Jagong | 2 |
| 26 | Jengkol | 27 |
| 27 | Gronggong | 42 |
| 28 | Karoya | 7 |
| 29 | Patapan | 41 |
| 30 | Cicurug | 4 |
| 31 | Cibinuang | 23 |
| 32 | Sawah Banjar | 6 |
| 33 | Pilang | 15 |

| | | |
|----|-------------|----|
| 34 | Kleret | 12 |
| 35 | Gunungbreg | 8 |
| 36 | Kenanga | 51 |
| 37 | Dukusuwung | 50 |
| 38 | Suminta | 19 |
| 39 | Gedongan | 15 |
| 40 | Cisamaya | 63 |
| 41 | Tegal Pucuk | 36 |

Sumber : Dinas PSDAP Kab. Cirebon, 2008

Potensi sumber daya air di Kabupaten Cirebon belum mampu menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat daripada lemahnya manajemen pengelolaan sumber-sumber air, menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan rusaknya daya dukung lingkungan yang semakin berat, serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi.

Kondisi infrastruktur irigasi sebagai pendukung pertanian belum seluruhnya terbangun, begitu pula infrastruktur yang ada memerlukan pemeliharaan yang terus menerus agar fungsinya tetap optimal. Mengingat Kabupaten Cirebon tidak memiliki sumber air, maka infrastruktur irigasi yang ada hanya mengandalkan dari DAS yang ada.

Tabel 2.23
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| Tahun | Panjang Saluran Irigasi (meter) | Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha) * | Rasio Jaringan Irigasi |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 2003 | 2.948.482 | 56.068 | 52,59 |
| 2004 | 3.018.862 | 55.325 | 54,57 |
| 2005 | 3.018.862 | 55.051 | 54,84 |
| 2006 | 2.523.658 | 54.812 | 46,04 |
| 2007 | 2.537.201 | 54.562 | 46,50 |

Sumber : Dinas PSDAP dan Dinas Tanbunak Kabupaten Cirebon, 2007

Keterangan : *) Data yang digunakan adalah luas lahan sawah.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa setiap 52,59 meter panjang saluran irigasi dapat mengairi lahan sawah seluas 1 hektar.

3. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Kondisi sarana dan prasarana permukiman dan perumahan hingga akhir Tahun 2007 masih belum memadai. Pada Tahun 2007 masih terdapat beberapa kecamatan yang belum terlayani air bersih dari PDAM Kabupaten Cirebon. Beberapa kecamatan yang telah memperoleh jaringan distribusi air bersih PDAM pun secara kualitas dan kuantitas belum dapat memenuhi harapan konsumen baik debit air/detik maupun kualitas air. Rata-rata pola operasi hanya mencapai 20 jam/hari sehingga masyarakat tidak dapat menikmati air bersih secara penuh 24 jam.

Kendala terbesar adalah wilayah administrasi yang luas sehingga memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga perlu ditunjang oleh APBN dan APBD Provinsi. Hal ini disebabkan PDAM sendiri lebih bersifat sosial sehingga keuntungan PDAM terbatas untuk operasional. Sampai dengan Tahun 2008 rumah tangga yang terlayani baru berkisar 25.094 sambungan atau sekitar 7,05% (PDAM, 2009). Rendahnya cakupan pelayanan air minum juga disebabkan oleh masih tingginya angka kebocoran air yang disebabkan oleh water meter induk serta jaringan perpipaan yang sebagian besar sudah melewati batas usia kemampuan atau sudah berumur lebih dari 20 tahun, serta terbatasnya sumber air baku karena baru menyewa 3 titik mata air dari Kabupaten Kuningan. Tarif/retribusi air yang belum berorientasi pada cost recovery, masih rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum, serta terbatasnya sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah. Selama periode Tahun 2003-2007, peningkatan cakupan pelayanan air minum difokuskan pada masyarakat miskin di wilayah Pantura dan perdesaan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Tabel 2.24
Cakupan Pelayanan Air Bersih PDAM Kabupaten Cirebon

| NO | URAIAN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Penduduk Terlayani | 136.654 | 138.050 | 139.494 | 140.704 | 158.764 |
| 2 | Jumlah Sambungan Rumah (SR) | 21.916 | 22.250 | 22.774 | 22.984 | 25.094 |
| 3 | Jumlah Kran Umum | 92 | 91 | 57 | 56 | 82 |
| 4 | Prosentase Penduduk terlayani Terhadap Penduduk Administrasi | 6,91 | 6,74 | 6,69 | 6,51 | 7,05 |
| 5 | Prosentase Penduduk terlayani Terhadap Penduduk Areal Pelayanan | 29,06 | 26,95 | 26,77 | 28,26 | 22,19 |
| 6 | Pola operasi (jam/hari) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Sumber : PDAM Kab. Cirebon 2009

4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah per Satuan Penduduk

Untuk aspek persampahan, tingkat pelayanan persampahan di Kabupaten Cirebon secara umum masih sangat rendah. Cakupan pelayanan persampahan hingga akhir tahun 2007 sebesar 23% dan sekitar 50% pengolahan sampah di TPA masih dilakukan secara open dumping. Selain itu kondisi sarana angkutan persampahan masih belum memadai.

Lokasi tempat pembuangan sampah akhir di Kabupaten Cirebon terdapat di 5 lokasi masing-masing diplotkan untuk wilayah Barat, Timur dan Tengah. Di wilayah Timur ditempatkan 2 lokasi untuk melayani wilayah Ciledug. Selanjutnya untuk melayani wilayah Selatan ditempatkan di Ciawi Japura Kecamatan Lemahabang. Di wilayah Tengah dan Barat lokasi pembuangan akhir berada di TPA Gunung Santri Desa Kepuh Kecamatan Palimanan. Sarana yang digunakan untuk mengangkut sampah digunakan 18 buah Dump Truk, 10 Arm Roll, 32 Container, 1 buah Dozer dll.

Tabel 2.25
Jumlah dan Lokasi Pembuangan Akhir (TPA)
Di Kabupaten Cirebon

| NO. | TPA | LOKASI | LUAS (Ha) |
|-----|--------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | Gunungsantri | Ds. Kepuh Kec. Palimanan | 3.0 |
| 2 | Gegesik | Ds. Gegesik Kidul Kec. Gegesik | 0.6 |
| 3 | Cihoe | Ds. Ciledug Wetan Kec. Ciledug | 0.5 |
| 4 | Ciawijapura | Ds. Ciawijapura Kec. Lemahabang | 1.5 |
| 5 | Ciledug | Ds. Ciledug Lor Kec. Ciledug | 2.0 |

Sumber : Dinas Cipta Karya Kab. Cirebon, 2007

Tabel 2.26
Rasio Jumlah Daya Tampung TPS per Satuan Penduduk
Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007

| Tahun | Volume Sampah (m ³) | Jumlah Penduduk | Rasio |
|-------|---------------------------------|-----------------|-------|
| 2003 | 97.200 | 2.035.100 | 47,76 |
| 2004 | 108.000 | 2.084.572 | 51,81 |
| 2005 | 129.600 | 2.107.918 | 61,48 |
| 2006 | 156.600 | 2.134.656 | 73,36 |
| 2007 | 189.000 | 2.143.545 | 88,17 |

Sumber : Dinas Cipta Karya Kab. Cirebon 2007

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2003 dari setiap sampah yang dihasilkan oleh 1000 penduduk hanya dapat ditampung oleh TPS sebanyak 47,76 m³. Sedangkan pada Tahun 2007 kemampuan TPS sebanyak 88,17 m³.

5. Rasio rumah layak huni

Kondisi rumah layak huni selama Tahun 2003-2007 di Kabupaten Cirebon cenderung meningkat sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2.27** dibawah ini.

Tabel 2.27
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| Tahun | Jumlah Rumah | Rumah Tidak Layak Huni (Unit) | Rumah Layak Huni (Unit) | Rumah Layak Huni (%) |
|-------|--------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 2003 | 559.891 | 226.476 | 333.415 | 59,55 |
| 2004 | 545.897 | 220.815 | 325.082 | 59,67 |
| 2005 | 540.396 | 218.590 | 321.806 | 59,61 |
| 2006 | 547.520 | 221.472 | 326.048 | 59,77 |
| 2007 | 551.398 | 223.040 | 328.358 | 59,77 |

Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2003 jumlah rumah layak huni sebanyak 59,55 % dari total rumah yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan demikian jumlah rumah yang tidak layak huni sebanyak 40,45% atau 229.555 rumah. Sedangkan pada Tahun 2007 jumlah layak huni meningkat menjadi 59,77%. Dengan demikian jumlah rumah tidak layak huni turun menjadi 40,23% atau 226.073 rumah.

6. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik selama Tahun 2003-2007 mengalami fluktuasi sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2.28**.

Tabel 2.28
Persentase rumah tangga di Kabupaten Cirebon yang menggunakan listrik Tahun 2003-2007

| Tahun | Jumlah Rumah Tangga (RT) | Rumah Tangga yang Sudah Menggunakan Listrik (Unit) | Rumah Tangga Pengguna Listrik (%) | Rumah Tangga yang Belum Menggunakan Listrik (Unit) | Rumah Tangga yang Belum Menggunakan Listrik (%) |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|--|---|
| 2003 | 559.891 | 552.332 | 98,65 | 7.559 | 1,35 |
| 2004 | 545.897 | 538.527 | 98,08 | 7.370 | 1,92 |
| 2005 | 540.396 | 533.101 | 97,84 | 7.295 | 2,16 |
| 2006 | 547.520 | 540.128 | 97,96 | 7.392 | 2,04 |
| 2007 | 551.398 | 543.954 | 98,48 | 7.444 | 1,52 |

Sumber : Bapeda Kab. Cirebon 2007

2.1.6 Politik

Pembangunan politik adalah proses perwujudan tatanan kehidupan politik yang makin mampu menjamin berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur politik dalam peningkatan kualitas pendidikan politik rakyat; pengembangan dan peningkatan budaya, sikap dan kesadaran politik yang demokratis, beretika dan bermoral; pengembangan dan peningkatan peranserta seluruh masyarakat; serta pematapan komunikasi politik dengan suasana dan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pembangunan Politik Daerah adalah bagian integral dari Pembangunan politik dalam negeri. Di Kabupaten Cirebon berorientasi pada fasilitasi bagi unsur-unsur/lembaga yang terkandung dalam infrastruktur dan suprastruktur politik dalam implementasi perbaikan struktur politik, peningkatan kualitas proses politik dan pengembangan budaya, sikap dan kesadaran politik yang berdasarkan Pancasila dan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Beberapa peraturan perundangan bidang politik dan ketentuan pelaksanaannya yang lebih mengarah pada perubahan paradigma pembangunan politik nasional maupun regional telah terbit, seperti

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.

Berdasarkan perkembangannya, jumlah partai politik yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Cirebon, pada tahun 2004 sebanyak 24 partai politik, dan pada tahun 2008 sebanyak 38 partai politik. Sedangkan jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Cirebon tahun 2008 sebanyak 175 organisasi yang didalamnya termasuk organisasi politik, organisasi sosial, organisasi profesi, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lainnya yang bergerak sesuai bidangnya.

Ditinjau dari proses pembinaan dan hasil pengembangan politik lokal, seluruh unsur organisasi tersebut di atas ternyata mempunyai peran penting dan senantiasa cukup berpengaruh didalam pembangunan politik terutama dalam hal pasang-surutnya dinamika permasalahan politik daerah. Organisasi-organisasi dimaksud telah banyak tumbuh, berkembang dan turut andil dalam peningkatan peran politik masyarakat baik dalam pendidikan politik maupun partisipasi politik. Oleh karenanya, berbagai aspirasi dan tuntutan wajar yang terbuka maupun tertutup berkembang di masyarakat, telah banyak ditampung dan disalurkan melalui lembaga-lembaga infrastruktur kepada lembaga / pihak-pihak pengambil keputusan.

Secara tajam dan mendasar terdapat empat permasalahan pokok dalam kehidupan sosial politik di Kabupaten Cirebon yang senantiasa terus ditangani secara intensif untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang, yaitu masalah kemandirian organisasi sosial politik, masalah tuntutan keterbukaan, masalah penetrasi dan campur tangan pihak luar, serta dampak politik dari setiap kesenjangan sosial. Hal ini terbukti dari situasi dan kondisi politik daerah yang senantiasa normal dan kondusif.

Penyelenggaraan Pemilihan umum dari masa-kemasa di Kabupaten Cirebon telah berjalan sukses, aman, tertib, dan lancar. Demikian pula dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2008 dengan tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih mencapai 62%, dan pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Cirebon tahun 2008 dengan tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih mencapai 65,21%. Dari prosentase tersebut nampak bahwa angka partisipasi masyarakat pada pelaksanaan demokratisasi meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari fasilitasi pemerintah daerah yang berbentuk sejumlah dana yang dianggarkan melalui APBD tahun 2007 dan 2008.

2.1.7 Hukum

Dalam situasi dan kondisi lemahnya supremasi hukum nasional, pembangunan hukum di Kabupaten Cirebon lebih diarahkan pada penataan produk hukum daerah sehubungan masa transisi dan awal pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa produk hukum daerah saat ini memerlukan revisi atau penyesuaian dengan perkembangan. Disamping itu, peraturan daerah yang ada pada saat ini belum seluruhnya dapat diterapkan baik pelaksanaan maupun sanksi hukumnya. Kendala ini terjadi karena rendahnya sosialisasi peraturan daerah.

Namun demikian potensi yang kita miliki seperti luasnya kewenangan di bidang pemerintahan umum, sumber pembiayaan yang mungkin dialokasikan, kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) sebagai lembaga yang berfungsi legislasi dan tingginya motivasi menerbitkan hukum daerah akan menjadi sumber motivasi dalam pelaksanaan pembangunan hukum. Agar optimalisasi pembangunan hukum dapat dicapai maka diperlukan upaya mengurangi beberapa kelemahan seperti kesadaran hukum masyarakat dan aparat yang relatif lemah, kemampuan menyerap bahasa dan pemahaman hukum relatif rendah, sikap mental penegak hukum, jaminan dan kepastian hukum yang adil belum dapat dilaksanakan.

Perkembangan pembangunan hukum selama 2003-2007, ditinjau dari kuantitas produk hukum daerah perkembangannya rata-rata setiap tahun 10 perda, 10 peraturan bupati, 2 nota kesepakatan, dan 29 MoU dengan pihak ketiga.

2.1.8 Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Kabupaten Cirebon dari segi keamanan dan ketertiban dikategorikan sebagai daerah yang sangat kondusif. Berdasarkan data Kepolisian Resort 852 Cirebon, perkembangan kasus dari Tahun 2003 hingga Tahun 2008 hanya mencapai 5%. Sedangkan menurut Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) jumlah angka kriminalitas selama Tahun 2003-2007 cenderung semakin meningkat sebagaimana dicantumkan dalam **Tabel 2.29** dibawah ini.

Tabel 2.29
Angka kriminalitas di Kabupaten Cirebon
Tahun 2003-2007

| Tahun | Angka kriminalitas (dalam 1 tahun) |
|-------|------------------------------------|
| 2003 | 2,49 |
| 2004 | 3,46 |
| 2005 | 3,47 |
| 2006 | 3,50 |
| 2007 | 5,28 |

Sumber : Badan Kesbang Linmas 2008

2.1.9 Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan dengan asas kepatuhan hukum terutama dalam penataan organisasi perangkat daerah. Sejak Tahun 2003 pemerintahan daerah telah menyesuaikan kelembagaan perangkat daerah dua kali yang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan terakhir PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perkembangan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan PP 8 Tahun 2003 berjumlah 81 SKPD, jumlah kecamatan menjadi 40 kecamatan sedangkan pada Tahun 2008 jumlah SKPD bertambah menjadi 84 SKPD. Upaya ini dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang lebih optimal.

Namun demikian perubahan organisasi perangkat daerah diharapkan membawa dampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Namun pada sisi lain anggaran belanja tidak langsung mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jabatan struktural dari semula 1.082 menjadi 1.274, berarti terjadi penambahan jabatan struktural 192. Selain kelembagaan perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon senantiasa memperkuat penyelenggaraan otonominya dengan penguatan kelembagaan pemerintahan desa.

Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak tahun 2003 telah mengalokasikan alokasi dana desa yang besarnya masing-masing desa berbeda tergantung jumlah penduduk dan luas wilayah serta status desa yang bersangkutan. Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah disalurkan mulai dari Rp. 40 juta hingga Rp 65 juta, atau pada setiap tahun telah dialokasikan sebanyak Rp. 24 Milyar. Selain melalui kemampuan APBD Kabupaten Cirebon, juga diupayakan perolehan bantuan desa baik dari APBN maupun APBD provinsi dalam bentuk dana tugas pembantuan, program-program pembangunan dan lain-lain.

Beberapa SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan (Puskesmas), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas perindustrian dan perdagangan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2.1.10 Aparatur

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun pegawai sampai bulan Desember 2008, jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Cirebon sebanyak 13.516 orang dengan komposisi dari segi kepangkatan dan golongan meliputi golongan I sebanyak 113 orang atau 0,84%, golongan II sebanyak 1962 orang atau 14,5%, golongan III sebanyak 5462 orang atau 40,41% dan golongan IV sebanyak 5.979 orang atau 44,24%.

Reformasi birokrasi menginginkan perubahan kultur birokrasi yang mengarah pada profesionalisme, beretika, impersonal, dan taat aturan.

Peningkatan profesionalisme aparatur terus dilakukan baik melalui jalur pendidikan formal, jabatan dan pendidikan teknis substantif. Demikian pula dari aspek pembiayaannya, tidak selalu mengandalkan pada kemampuan APBD, melainkan pula telah berkerja sama dengan lembaga lainnya. Peningkatan kompetensi pendidikan formal PNS dapat dilihat upaya pada jenjang pendidikan D-3 kebidanan sebanyak 16 orang. Jenjang S-1 melalui jalur ijin belajar sebanyak 300 orang, tugas belajar sebanyak 103 orang. Jenjang D-4 untuk tugas belajar sebanyak 8 orang. Jenjang S-2 melalui jalur ijin belajar sebanyak 40 orang, tugas belajar sebanyak 10 orang. Kondisi ini telah memberi kontribusi tersendiri terhadap pengalokasian anggaran yang lebih efisien dengan mengurangi beban belanja aparatur daerah. Walaupun demikian, pengendalian keseimbangan antara kebutuhan kualifikasi kompetensi aparatur daerah

dengan minat mengikuti pendidikan formal melalui jalur ijin belajar, terus dilakukan secara cermat.

Penajaman kompetensi aparatur ditempuh pula melalui mekanisme mutasi jabatan, melalui mekanisme asesment pegawai, psikotest dan fit and proper test. Upaya lainnya yang didorong dalam meningkatkan profesionalisme aparatur dan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah ditempuh melalui perbaikan kesejahteraan pegawai antara lain melalui medical check up secara rutin setiap satu tahun, peningkatan pelayanan Bapertarum, pemberian penghargaan baik untuk para purna bakti PNS dengan pemberian uang kadeudeuh maupun bagi para PNS dengan memberikan penghargaan lencana karya satya, dan pemberian uang duka untuk pegawai yang meninggal dunia.

Dalam mewujudkan kultur budaya taat aturan diperlukan pengawasan aparatur yang maksimal melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja aparatur. Penyelenggaraan kinerja aparatur yang maksimal harus diberikan penghargaan (reward) dan bagi aparatur yang melanggar diberikan sangsi dari tingkatan teguran, penurunan pangkat sampai ke pemecatan sebagai status kepegawaiannya.

2.2 Tantangan

2.2.1 Keagamaan

Deras dan bebasnya arus informasi yang masuk ke Kabupaten Cirebon akibat kemajuan teknologi dan informasi memberikan dampak negatif pada bidang keagamaan. Pada 20 tahun kedepan moral bangsa diperkirakan mengalami dekadensi yang cukup signifikan, dapat dilihat melalui makanan asing yang mulai digemari remaja saat ini, pakaian yang tidak sesuai norma agama dan etika serta nilai-nilai kesopanan yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

2.2.2 Kesehatan

Tantangan pembangunan di bidang kesehatan yang harus kita hadapi adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan, tingkat sosial ekonomi dan gender, meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai, meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan penggunaan narkotik dan obat-obat terlarang.

2.2.3 Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan pada 20 tahun kedepan menghadapi tantangan antara lain menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, dan antara jenis kelamin.

2.2.4 Ekonomi

Pada 20 tahun ke depan, pembangunan di bidang ekonomi menghadapi tantangan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang lebih maju; mengentaskan kemiskinan; mengurangi pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing tenaga kerja; dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

2.2.5 Infrastruktur Wilayah

Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah di Kabupaten Cirebon adalah tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan meliputi pengembangan angkutan umum massal untuk daerah-daerah yang berpenduduk padat, pengembangan jaringan jalan yang efektif dan efisien baik berupa jaringan jalan tol maupun yang bukan tol, yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama; pengaturan hierarki peran serta fungsi jaringan transportasi yang lebih baik agar menghasilkan pergerakan yang efisien dan efektif; pengembangan pelabuhan baru; pengembangan infrastruktur penampung air baku, baik yang bersifat alami maupun buatan untuk meminimalisasi terjadinya bencana banjir dan kekeringan; peningkatan layanan jaringan irigasi untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi; pengembangan jaringan telekomunikasi baik yang menggunakan jaringan kabel maupun nirkabel; pengembangan sarana dan prasarana dasar permukiman dan perumahan, meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan serta pengembangan pengelolaan sampah.

2.2.6 Politik

Masalah kemandirian organisasi sosial politik, masalah tuntutan keterbukaan, masalah penetrasi dan campur tangan pihak luar, serta dampak politik dari setiap kesenjangan sosial merupakan tantangan yang harus kita hadapi di masa mendatang.

2.2.7 Hukum

Pembangunan hukum yang berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai aturan dan penegakan aturan merupakan tantangan yang harus kita hadapi di masa yang akan datang. Penegakan hukum harus dilakukan pemerintah daerah untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan

kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang cenderung menurun.

2.2.8 Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban dan ketentraman masyarakat di masa yang akan datang akan menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh lambannya pencaian keseimbangan jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan. Selain itu, ketertiban dan ketentraman masyarakat berpotensi terganggu akibat pemanfaatan teknologi yang canggih sehingga muncul kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan negara.

2.2.9 Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Tantangan yang akan dihadapi pada 20 tahun mendatang dalam bidang pemerintahan adalah sering adanya perubahan susunan organisasi sehingga seringkali mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Adapun tantangan pada pembangunan desa adalah mewujudkan kemandirian desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa yang maju dan tertinggal.

2.2.10 Aparatur

Mewujudkan birokrasi yang mampu memformulasikan kebijakan sesuai dengan kebijakan politik dan aspirasi masyarakat dan dapat mengimplementasikannya secara bertanggung jawab merupakan tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon di masa yang akan datang. Hal ini merupakan tantangan karena masih rendahnya SDM aparatur dan rendahnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan belum optimalnya pemanfaatan kesisteman yang didukung oleh teknologi informasi dalam proses administrasi pemerintahan.

Dalam mewujudkan kondisi pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan publik diperlukan penetapan standar pelayanan

minimal diberbagai bidang yang diiringi dengan pengawasan aparatur yang maksimal melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja aparatur. Penyelenggaraan kinerja aparatur yang maksimal harus diberikan penghargaan (reward) dan bagi aparatur yang melanggar diberikan sanksi dari tingkatan teguran, penurunan pangkat sampai ke pemecatan sebagai status kepegawaiannya.

2.3 Modal Dasar

Modal dasar pembangunan di Kabupaten Cirebon yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan daerah, antara lain:

1. Posisi geografis Kabupaten Cirebon yang berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah menjadikan kabupaten Cirebon pada posisi yang strategis sebagai arus lintasan utama Jawa Barat dan Jawa Tengah.
2. Luasnya lahan pertanian dapat menjadi modal dasar dalam mewujudkan ketahanan pangan baik bersifat lokal, regional maupun nasional.
3. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil dapat menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon.
4. Keragaman budaya lokal dan banyaknya potensi obyek pariwisata dapat dikembangkan menjadi industri pariwisata yang dapat memberdayakan masyarakat sekitar.

BAB III

VISI DAN MISI

3.1 Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 adalah:

**“ Terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan produktif
menuju masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera”**

Pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon, diatas memiliki makna:

1. Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang mengamalkan ajaran agamanya dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Produktif adalah kondisi masyarakat Kabupaten Cirebon yang mandiri, berdaya guna dan berdaya saing tinggi.
3. Sejahtera adalah kondisi terpenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan yang memberikan perasaan adil, aman dan makmur.

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

1. Sumber Daya Manusia yang beriman ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah orang yang beribadah dan jumlah tempat peribadatan, menguatnya kerukunan umat beragama dan antar umat beragama dan menurunnya penyakit masyarakat di Kabupaten Cirebon.
2. Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon yang produktif ditunjukkan dengan berkurangnya pengangguran dan meningkatnya kualitas SDM.
3. Masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera ditunjukkan dengan meningkatnya harmonisasi hubungan manusia dengan Allah manusia dan lingkungannya.

3.2 Misi Pembangunan

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang akan dicapai melalui empat misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah mengembangkan potensi SDM yang telah dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk menciptakan SDM yang beriman, mandiri, berdaya guna dan berdaya saing tinggi.
2. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lestari adalah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budi daya dan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
3. Terwujudnya perekonomian yang kuat adalah mengembangkan potensi usaha melalui pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemberian bantuan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel adalah meningkatkan kinerja aparatur pemerintah untuk memenuhi fungsi pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon yang efektif.

BAB IV
ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

Untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah ditentukan sasaran pembangunan pada setiap misi sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, ditandai oleh hal-hal berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas kerukunan hidup antar dan inter umat beragama;
 - b. Menurunnya jumlah penyakit masyarakat;
 - c. Meningkatnya indeks kesehatan;
 - d. Meningkatnya indeks pendidikan;
 - e. Meningkatnya daya beli masyarakat;
 - f. Menurunnya jumlah pengangguran.
2. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lestari, ditandai oleh hal-hal berikut:
 - a. Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - b. Berkurangnya daerah rawan banjir dan kekeringan;
 - c. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, serta modal pembangunan daerah;
 - d. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
3. Terwujudnya perekonomian yang kuat, ditandai oleh hal-hal berikut:
 - a. Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi;
 - b. Meningkatnya infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi yang efisien dan modern, dan sarana-prasarana dasar permukiman yang berkualitas;
 - c. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan investasi di daerah;
 - d. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Cirebon;
 - e. Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi.

4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel, ditandai hal-hal berikut :
 - a. Tidak adanya keluhan masyarakat terhadap pemerintah berkaitan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. Berkurangnya angka demo masyarakat terhadap pemerintah;
 - c. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan pemerintah dapat selalu diketahui oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.1 Arah Pembangunan

4.1.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Terwujudnya sumber daya yang berkualitas, baik dari segi pendidikan maupun kesehatan yang berlandaskan pada agama dan budaya lokal merupakan modal dasar bagi pembangunan di bidang lainnya. Oleh karenanya pembangunan bidang agama, pendidikan, kesehatan dan ekonomi merupakan pembangunan utama di Kabupaten Cirebon.

Pembangunan bidang keagamaan merupakan landasan bagi terciptanya sumber daya manusia yang religius dan diharapkan dapat mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan di bidang keagamaan diarahkan pada:

1. Peningkatan pemahaman ajaran agama;
2. Peningkatan pengamalan ajaran agama secara menyeluruh;
3. Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antar umat beragama;
4. Pengembangan sarana dan lembaga keagamaan;
5. Peningkatan pelayanan keagamaan.

Pembangunan dibidang pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian nasional, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dalam persaingan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan pasar. Pembangunan di bidang pendidikan diarahkan pada:

1. Pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat;

2. Penyediaan sarana pendidikan yang bermutu dan merata;
3. Pengembangan tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien dengan pencitraan publik yang akuntabel dan profesional;
4. Peningkatan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan disertai upaya peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pembangunan dibidang kesehatan dititikberatkan pada kesehatan ibu dan anak, sanitasi, peningkatan kualitas gizi masyarakat dan peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan pada:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat miskin;
2. Pemerataan pembangunan kesehatan;
3. Peningkatan distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif dan aman bagi penduduk dengan harga yang terjangkau;
4. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medik.

Pembangunan dibidang ekonomi dititikberatkan pada peningkatan daya beli masyarakat dengan arah pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja;
2. Peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi;
3. Penumbuhan wirausaha.

4.1.2 Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Lestari

Lingkungan hidup yang lestari mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan nyaman. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada:

1. Penataan lingkungan yang diatur dalam RTRW;
2. Pembangunan Kawasan Hijau;
3. Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan.

4.1.3 Mewujudkan Perekonomian Yang Kuat

Perekonomian yang kuat merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan dalam era otonomi daerah. Pembangunan yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah pembangunan bidang pertanian, infrastruktur, pembangunan bidang tenaga kerja, pembangunan bidang industri dan perdagangan,

pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan di bidang pariwisata, pembangunan di bidang koperasi.

Pembangunan dibidang pertanian diarahkan pada:

1. Pengembangan industri input yang memadai dari segi jumlah, kualitas, waktu, yang sesuai dengan tuntutan pengembangan agri bisnis hilir;
2. Pengembangan teknologi budidaya dan organisasi produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman, ternak, dan ikan dengan menggunakan lahan minimal dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman bagi konsumen;
3. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil produk primer;
4. Pengembangan sistem pemasaran yang berorientasi pada perubahan permintaan konsumen;
5. Pengembangan penunjang sistem yang berfungsi mengatur dan memandu sistem pertanian dan bisnis kelautan;
6. Peningkatan wawasan dan budaya bahari melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan, pelestarian nilai-nilai budaya dan restorasi dan konservasi budaya bawah air.

Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi, dan sarana prasarana pemukiman yang diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas perekonomian. Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah, guna terciptanya keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah.

Pembangunan bidang tenaga kerja diarahkan pada:

1. Peningkatan daya saing tenaga kerja;
2. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja;
3. Penciptaan lapangan pekerjaan.

Pembangunan bidang industri dan perdagangan diarahkan pada:

1. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui diversifikasi produk hasil penelitian dan pengembangan, pendalaman struktur, penguatan hubungan kemitraan antar industri dan pendukung infrastruktur industri;
2. Pembangunan industri yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan, pengembangan industri ramah lingkungan serta pengembangan industri berbahan baku yang terbarukan;

3. Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu berdaya saing baik dipasar lokal maupun internasional;
4. Pengembangan industri substitusi impor, industri yang potensial dan industri kreatif;
5. Peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal dan regional, nasional dan internasional;
6. Peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang efektif dan efisien;
7. Peningkatan perlindungan konsumen serta peningkatan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri.

Pemanfaatan sumber daya alam diarahkan pada pemanfaatan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan agar terhindar dari bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia.

Pembangunan dibidang pariwisata diarahkan pada pengembangan potensi objek pariwisata yang terdapat di Kabupaten Cirebon. Pengembangan tersebut diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pembangunan dibidang koperasi diarahkan pada peningkatan daya saing koperasi melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan, peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar.

4.1.4 Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel tidaklah mudah karena berkaitan dengan seluruh stakeholders di Kabupaten Cirebon. Masyarakat sebagai pengawas diharapkan dapat menjalankan fungsi tersebut. Pemerintah selaku abdi masyarakat dapat menjalankan amanah masyarakat dengan tertib administrasi, tertib keuangan dan pertanggung jawaban.

Pembangunan dibidang kepegawaian dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah berupa pendidikan dan latihan, bimbingan rohani dan pemberian insentif dan disinsentif berbasis kinerja.

4.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud diatas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda. Namun demikian, penetapan skala prioritas tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dalam empat misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat lebih difokuskan menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut :

4.2.1 RPJM Daerah Pertama (2005 - 2009)

RPJMD pertama diarahkan untuk menata dan membangun masyarakat dalam segala bidang menuju masyarakat yang beriman dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut dilakukan melalui strategi utama (grand strategic) yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peningkatan Performance (penampilan). Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera maka pembangunan dilaksanakan melalui berbagai bidang yaitu :

Pembangunan dibidang agama diarahkan pada peningkatan fasilitas pelayanan dan pemeliharaan tempat ibadah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat; dan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan, pendidikan agama, dan organisasi keagamaan.

Pembangunan dibidang pendidikan diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, pendidikan luar sekolah, ketersediaan tenaga guru dan peningkatan biaya operasional melalui peningkatan rata-rata lama sekolah, angka

melek huruf dan pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 (sembilan) tahun.

Pembangunan dibidang kesehatan diarahkan pada pengurangan angka kematian bayi dan ibu melahirkan melalui pelayanan kesehatan masyarakat, penambahan jumlah tenaga medis, cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial diarahkan pada pengoptimalan perlindungan sosial bagi PMKS, pemberdayaan PMKS, dan pengembangan sistem pelayanan, potensi kesejahteraan sosial dan pekerja sosial.

Pembangunan dibidang pertanian diarahkan untuk peningkatan produksi pertanian, mempertahankan luas areal pertanian, dan pemberdayaan sumber daya pertanian.

Pembangunan dibidang industri perdagangan diarahkan untuk peningkatan investasi, pemberdayaan pelaku ekonomi, dan infrastruktur pendukung perekonomian.

Pembangunan dibidang politik dan pemerintahan diarahkan untuk penyiapan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2008, pemantapan manajemen perangkat daerah dan pembiayaan.

Pembangunan dibidang hukum, keamanan dan ketertiban diarahkan untuk penegakkan peraturan daerah, membangun partisipasi masyarakat, dan peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.

Pembangunan dibidang fisik prasarana dan lingkungan hidup diarahkan untuk peningkatan prasarana pelayanan dasar umum, prasarana wilayah, mereklamasi dan merehabilitasi lingkungan yang rusak akibat eksploitasi.

4.2.2 RPJM Daerah Kedua (2009 - 2014)

Pada tahapan ini pelaksanaan pembangunan dilaksanakan untuk melanjutkan pembangunan tahap pertama. Pembangunan daerah pada tahap ini diprioritaskan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif disegala bidang menuju masyarakat sejahtera yang ditandai dengan peningkatan angka IPM.

Misi pertama: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Bidang Agama. Pembangunan dibidang agama diprioritaskan pada penurunan penyakit masyarakat dan kriminalitas sebesar 10% dan melek membaca Alqur'an sebesar 90%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai prioritas-prioritas tersebut adalah melalui pelaksanaan program peningkatan pelayanan hidup beragama dan program peningkatan kualitas pendidikan agama.

Bidang Pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan diprioritaskan pada peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf melalui pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat terutama bagi keluarga kurang mampu, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana pendidikan, rintisan wajib belajar dua belas tahun, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan pelayanan pendidikan luar sekolah dan pendidikan informal berbasis potensi daerah dan pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi.

Bidang Perpustakaan. Pembangunan dibidang perpustakaan diprioritaskan pada peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan peningkatan kemampuan dan budaya masyarakat dalam membaca.

Bidang Kesehatan. Pembangunan dibidang kesehatan diprioritaskan pada peningkatan angka harapan hidup melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha melalui peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Sedangkan perlindungan terhadap anak dilakukan melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak.

Bidang Sosial. Pembangunan dibidang sosial diprioritaskan pada penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pemberdayaan PMKS. Sedangkan peningkatan kuantitas dan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga dan kelompok masyarakat dilakukan melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga diprioritaskan pada peningkatan prestasi olah raga menjadi 5 cabang melalui penyediaan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi dengan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) di delapan lokasi; berkurangnya jumlah pemuda yang buta aksara sebanyak 1% melalui program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda; dan peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan sebanyak 20% melalui program peningkatan peran serta kepemudaan.

Bidang Kebudayaan. Pembangunan dibidang kebudayaan diprioritaskan pada meningkatnya jumlah ragam budaya Cirebon sebanyak 20 buah per tahun melalui fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pembangunan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diprioritaskan pada penurunan laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,39% melalui penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin dan pengembangan model operasional Bina Keluarga Balita (BKB), posyandu, dan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri. Pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diprioritaskan pada peningkatan wawasan, kesadaran dan tindakan masyarakat dalam tatanan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara melalui kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat; peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; dan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Misi kedua: Meningkatkan Lingkungan Hidup yang Lestari

Bidang Lingkungan Hidup. Pembangunan dibidang lingkungan hidup diprioritaskan pada peningkatan kualitas lingkungan melalui pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi 30% dengan merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon.

Bidang Penataan Ruang. Pembangunan dibidang penataan ruang diprioritaskan pada penetapan RTRW, rencana kawasan strategis dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan terarahnya pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW, rencana kawasan strategis dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui penyiapan petunjuk pelaksanaan rencana tata ruang dan harmonisasi pelaksanaan program pemanfaatan dan pengendalian ruang antara pusat, provinsi dan kabupaten.

Bidang Pertanahan. Pembangunan dibidang pertanahan diprioritaskan pada penertiban administrasi inventaris asset tanah pemerintah daerah dengan target sebanyak 147 bidang tanah per tahun melalui pelaksanaan program penataan penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Pembangunan dibidang energi dan sumber daya mineral diprioritaskan pada pengurangan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan melalui pelaksanaan program pengawasan dan

penertiban kegiatan penambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, dan penyediaan sumber energi listrik bagi masyarakat miskin melalui pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

Misi ketiga: Meningkatkan Perekonomian yang Kuat

Bidang Kelautan dan Perikanan. Pembangunan dibidang kelautan dan perikanan diprioritaskan pada peningkatan ekspor hasil perikanan menjadi 986,78 ton dan konsumsi ikan per kapita per tahun menjadi 26 kg melalui program peningkatan kapasitas kelautan dan perikanan, program pembinaan dan pengembangan mutu hasil perikanan; serta peningkatan hasil produksi perikanan.

Bidang Perumahan dan Permukiman. Pembangunan dibidang perumahan dan permukiman diprioritaskan pada fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, lingkungan sehat pemukiman, pengembangan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan.

Bidang Kehutanan. Pembangunan dibidang kehutanan diprioritaskan pada peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil hutan menjadi Rp 16.000.000,- per hektar dan dari hasil hutan non kayu yang terdiri dari peternak madu, jamur dan tanaman tegakan melalui pelaksanaan program pemanfaatan potensi sumber daya hutan; dan berkurangnya lahan kritis.

Bidang ketenagakerjaan. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada penciptaan kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui program pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang berbasis peluang kerja, potensi lokal, dan kewirausahaan, dan penciptaan lapangan pekerjaan melalui program peningkatan kesempatan kerja dengan pembentukan jejaring kerja pusat dan daerah melalui sistem informasi.

Bidang Ketransmigrasian. Pembangunan dibidang ketransmigrasian diprioritaskan pada peningkatan jumlah lokasi tujuan transmigrasi, jumlah transmigran yang memperoleh peluang berusaha dan tempat tinggal, dan

pembinaan transmigran melalui program pengembangan wilayah transmigrasi dengan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa diprioritaskan pada peningkatan peran serta masyarakat, fungsi kelembagaan, dan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui program pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan aparatur desa, dan pemberdayaan lembaga ekonomi pedesaan.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Pembangunan dibidang KUMKM diprioritaskan pada penguatan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM melalui upaya penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Bidang Pertanian. Pembangunan dibidang pertanian diprioritaskan pada peningkatan produksi dan nilai tambah atau produktivitas hasil pertanian.

Bidang Ketahanan Pangan. Pembangunan dibidang ketahanan pangan diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan petani melalui penguatan kelembagaan, ketersediaan dan distribusi hasil produksi.

Bidang Pariwisata. Pembangunan dibidang pariwisata diprioritaskan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata di Kabupaten Cirebon melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Cirebon.

Bidang Perdagangan. Pembangunan dibidang perdagangan diprioritaskan pada pengembangan pasar dan distribusi barang, efisiensi perdagangan dalam negeri, dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

Bidang Industri. Pembangunan dibidang industri diprioritaskan pada peningkatan daya saing industri melalui upaya pengembangan industri kecil dan menengah, optimalisasi dan pengembangan sentra-sentra industri dan jasa.

Bidang Penanaman Modal. Pembangunan dibidang penanaman modal diprioritaskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perijinan, peningkatan pelayanan penanaman modal, dan peningkatan promosi dan kerja sama investasi.

Bidang Pekerjaan Umum. Pembangunan dibidang pekerjaan umum diprioritaskan pada peningkatan akses ekonomi masyarakat melalui upaya penyediaan infrastruktur yang memadai, dan peningkatan pencegahan dan pengendalian banjir dan kekeringan melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, serta konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya.

Bidang Perhubungan. Pembangunan dibidang perhubungan diprioritaskan pada peningkatan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan, pelayanan angkutan, dan pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

Misi keempat : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel

Bidang Perencanaan Pembangunan. Pembangunan dibidang perencanaan pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kesesuaian perencanaan, penganggaran dan implementasi pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, dan sinergisitas pelaksanaan program pembangunan daerah dibidang ekonomi, sosial budaya dan prasarana wilayah.

Bidang Komunikasi dan Informatika. Pembangunan dibidang komunikasi dan informatika diprioritaskan pada penerapan dan pengembangan teknologi

informasi melalui pelaksanaan program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan membentuk sistem informasi daerah dan radio publik.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pembangunan dibidang ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah, kapasitas lembaga legislatif, kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bidang Statistik. Pembangunan dibidang statistik diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan program pengembangan data/informasi/statistik daerah.

Bidang Kearsipan. Pembangunan dibidang kearsipan diprioritaskan pada peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan daerah dan kinerja pengelolaan kearsipan menuju tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui rintisan sistem informasi administrasi kearsipan.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Pembangunan dibidang kependudukan dan catatan sipil diprioritaskan pada peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (cepat, tepat, murah dan transparan) melalui pelaksanaan program pendataan dan perkembangan kependudukan.

4.2.3 RPJM Daerah Ketiga (2014 - 2019)

Pada tahapan ini pelaksanaan pembangunan dilaksanakan untuk melanjutkan pembangunan sebelumnya. Pembangunan daerah pada tahap ini diprioritaskan untuk memantapkan pencapaian masyarakat yang sejahtera disegala bidang yang ditandai dengan peningkatan angka IPM.

Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi pertama: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Bidang agama. Pembangunan dibidang agama diprioritaskan pada penurunan penyakit masyarakat dan kriminalitas sebesar 8% dan melek membaca Alqur'an sebesar 92%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai prioritas-prioritas tersebut adalah melalui pelaksanaan program peningkatan pelayanan hidup beragama dan program peningkatan kualitas pendidikan agama, dan optimalisasi peran lembaga sosial keagamaan.

Bidang Pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan diprioritaskan pada peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf melalui pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat terutama bagi keluarga kurang mampu, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, penuntasan program wajib belajar dua belas tahun, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan pelayanan pendidikan luar sekolah dan pendidikan informal berbasis potensi daerah dan pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi, dan peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi.

Bidang Perpustakaan. Pembangunan dibidang perpustakaan diprioritaskan pada peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pembangunan taman bacaan di setiap kecamatan.

Bidang Kesehatan. Pembangunan dibidang kesehatan diprioritaskan pada peningkatan angka harapan hidup melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak untuk penurunan AKI dan AKB, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, dan peningkatan desa siaga sehat aktif.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada peningkatan kemandirian dan daya saing perempuan dalam

memperoleh kesempatan kerja. Sedangkan peningkatan perlindungan terhadap anak dilakukan melalui optimalisasi peran keluarga dan lembaga perlindungan anak.

Bidang Sosial. Pembangunan dibidang sosial diprioritaskan pada penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui peningkatan pemberdayaan PMKS; dan peningkatan kuantitas dan kualitas kesejahteraan sosial perseorang, keluarga dan kelompok masyarakat melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga diprioritaskan pada peningkatan prestasi olah raga menjadi 7 cabang olah raga melalui pemanfaatan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi dengan penambahan pembangunan GOR; dan peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan sebanyak 30% melalui program peningkatan peran serta kepemudaan, serta penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.

Bidang Kebudayaan. Pembangunan dibidang kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian ragam dan budaya tradisional dan kearifan lokal Cirebon melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan pengelolaan keragaman budaya.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diprioritaskan pada penurunan laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,17% melalui penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dan pengembangan model operasional Bina Keluarga Balita (BKB), posyandu, dan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU), pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) mandiri.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri. Pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tetap diprioritaskan pada peningkatan wawasan, kesadaran dan tindakan masyarakat dalam tatanan kehidupan beragama,

berbangsa dan bernegara melalui kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; pendidikan politik masyarakat; peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; dan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Misi kedua: Meningkatkan Lingkungan Hidup yang Lestari

Bidang Lingkungan Hidup. Pembangunan dibidang lingkungan hidup diprioritaskan pada peningkatan kualitas lingkungan melalui peningkatan pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berbasis teknologi ramah lingkungan; partisipasi dan kemitraan masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam, konsistensi dalam penegakan hukum, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan, sistem mitigasi dan penanggulangan bencana alam yang handal.

Bidang Penataan Ruang. Pembangunan dibidang penataan ruang diprioritaskan pada peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW, rencana kawasan strategis dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui peran serta masyarakat, pemantapan sistem pengendalian dan koordinasi dalam pengaturan pembinaan, pelaksanaan serta pengawasan penataan ruang. Penataan ruang dilaksanakan dengan penggunaan data dan informasi spasial yang mutakhir, dan terpeliharanya alokasi ruang kawasan lindung dan lahan sawah.

Bidang Pertanahan. Pembangunan dibidang pertanahan diprioritaskan pada peningkatan tertib administrasi inventaris asset tanah pemerintah daerah melalui pelaksanaan program penataan penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Bidang Energi dan Sumber daya Mineral. Pembangunan dibidang energi dan sumber daya mineral diprioritaskan pada pengurangan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan melalui peningkatan pelaksanaan program pengawasan dan penertiban kegiatan penambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, dan penyediaan sumber energi listrik bagi masyarakat miskin

melalui pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, rintisan diversifikasi alternatif sumber energi non migas.

Bidang Kelautan dan Perikanan. Pembangunan dibidang kelautan dan perikanan diprioritaskan pada konservasi sumber daya kelautan melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan sasaran bertambahnya luas area tanaman mangrove di wilayah pesisir menjadi 400 ha, bertambahnya jumlah terumbu karang buatan yang ditenggelamkan di laut menjadi 200 unit, dan persiapan dan pengembangan tahap awal pelabuhan pengumpan Gebang, dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Bidang Perumahan dan Permukiman. Pembangunan dibidang perumahan dan permukiman diprioritaskan pada peningkatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, lingkungan sehat permukiman, pengembangan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan.

Bidang Kehutanan. Pembangunan dibidang kehutanan diprioritaskan pada peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil hutan kayu dan non kayu yang terdiri dari peternak madu, jamur dan tanaman tegakan melalui pelaksanaan program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.

Misi ketiga: Meningkatkan Perekonomian yang Kuat

Bidang ketenagakerjaan. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, pemantapan sistem jejaring kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan, peningkatan peran lembaga ketenagakerjaan, sinergisitas sistem pendidikan dan ketenagakerjaan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Bidang Ketransmigrasian. Pembangunan dibidang ketransmigrasian diprioritaskan pada peningkatan jumlah lokasi tujuan transmigrasi, jumlah transmigran yang memperoleh peluang berusaha dan tempat tinggal, dan

pembinaan transmigran melalui program pengembangan wilayah transmigrasi dengan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa diprioritaskan pada peningkatan peran serta masyarakat, fungsi kelembagaan, dan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui program pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan aparatur desa, dan pemberdayaan lembaga ekonomi pedesaan, peningkatan pelaksanaan program desa membangun, dan peningkatan kesejahteraan aparatur desa.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Pembangunan dibidang KUMKM diprioritaskan pada peningkatan penguatan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM melalui upaya penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Bidang Pertanian. Pembangunan dibidang pertanian diprioritaskan pada peningkatan produksi dan nilai tambah atau produktivitas hasil pertanian, dan pengembangan pola agribisnis berbasis potensi lokal.

Bidang Ketahanan Pangan. Pembangunan dibidang ketahanan pangan diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan petani, penguatan kelembagaan petani, ketersediaan dan pengaturan pola distribusi hasil produksi

Bidang Pariwisata. Pembangunan dibidang pariwisata diprioritaskan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata di Kabupaten Cirebon melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Cirebon, dan peningkatan industri pariwisata melalui pengelolaan pariwisata yang lebih profesional.

Bidang Perdagangan. Pembangunan dibidang perdagangan diprioritaskan pada revitalisasi pasar tradisional, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya perdagangan, mendorong perdagangan berbasis potensi lokal yang berorientasi ekspor, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen melalui pendirian layanan pengaduan konsumen.

Bidang Industri. Pembangunan dibidang industri diprioritaskan pada peningkatan kemampuan sumber daya industri, pengembangan industri kecil yang tangguh, peningkatan penggunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem produksi, dan penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar.

Bidang Penanaman Modal. Pembangunan dibidang penanaman modal diprioritaskan pada peningkatan penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan penanaman modal dengan berbasis sistem teknologi informasi-komunikasi, dan memanfaatkan data base peluang investasi di tingkat lokal dan regional.

Bidang Pekerjaan Umum. Pembangunan dibidang pekerjaan umum diprioritaskan pada peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan pencegahan dan pengendalian banjir dan kekeringan, percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah tertinggal, peningkatan kemantapan infrastruktur yang telah ada, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di wilayah strategis.

Bidang Perhubungan. Pembangunan dibidang perhubungan diprioritaskan pada peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan, pelayanan angkutan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dan penataan angkutan umum.

Misi keempat: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Bidang Perencanaan Pembangunan. Pembangunan dibidang perencanaan pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kapasitas aparatur perencana, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Bidang Komunikasi dan Informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika diprioritaskan pada pemanfaatan sistem informasi komunikasi daerah untuk menginformasikan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan hasil-hasil pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan di kabupaten Cirebon, menampung keluhan dan pengaduan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur informasi dan komunikasi sampai seluruh kecamatan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pembangunan dalam bidang ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas belanja pembangunan, peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, kapasitas lembaga legislatif, kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dan kinerja PNS.

Bidang Statistik. Pembangunan dibidang statistik diprioritaskan pada penyusunan sistem data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

Bidang Kearsipan. Pembangunan dibidang kearsipan diprioritaskan pada peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan daerah dan kinerja pengelolaan kearsipan menuju tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan sistem informasi administrasi kearsipan.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Pembangunan dibidang kependudukan dan catatan sipil diprioritaskan pada peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (cepat, tepat, murah dan transparan) melalui pelaksanaan program sistem informasi administrasi kependudukan.

4.2.4 RPJM Daerah Keempat (2019 – 2024)

Pada tahapan ini pelaksanaan pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera disegala bidang yang ditandai dengan peningkatan angka IPM.

Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi pertama: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Bidang agama. Pembangunan dibidang agama diprioritaskan pada pengimplementasian ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan penurunan penyakit masyarakat dan kriminalitas sebesar 2% dan melek membaca Al Qur an sebesar 95%, peningkatan kualitas pendidikan agama, dan optimalisasi peran lembaga sosial keagamaan, peningkatan toleransi antar umat beragama, kemandirian dalam penyelenggaraan keagamaan.

Bidang Pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan diprioritaskan pada peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf melalui pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat terutama bagi keluarga kurang mampu, tuntas program wajib belajar dua belas tahun disertai dengan peningkatan kualitas siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah dan bantuan bea siswa dari keluarga yang kurang mampu, perintisan program wajib belajar lima belas tahun, pengembangan pelayanan pendidikan luar sekolah dan pendidikan informal berbasis potensi daerah dan pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi berskala nasional dan internasional, peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi, dan pendidikan ketrampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat.

Bidang perpustakaan. Pembangunan dibidang perpustakaan diprioritaskan pada peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pembangunan taman bacaan di setiap desa.

Bidang Kesehatan. Pembangunan dibidang kesehatan diprioritaskan melalui upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah, mutu dan jenis tenaga kesehatan, pemberdayaan profesi kesehatan (institusi), dan terwujudnya sistem insentif dan disinsentif untuk meningkatkan partipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada peningkatan kemandirian dan daya saing perempuan dalam memperoleh kesempatan berusaha, peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Sedangkan peningkatan perlindungan terhadap anak dilakukan melalui optimalisasi peran keluarga dan lembaga perlindungan anak.

Bidang Sosial. Pembangunan dibidang sosial diprioritaskan pada penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui peningkatan pemberdayaan PMKS; dan peningkatan kuantitas dan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga dan kelompok masyarakat melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, serta peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga diprioritaskan pada peningkatan prestasi olah raga menjadi 9 cabang olah raga melalui pemanfaatan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi dengan penambahan pembangunan GOR; dan peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan sebanyak 40% melalui program peningkatan peran serta kepemudaan, penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pencapaian kemandirian pemuda dan olahraga, mempertahankan

keunggulan olah raga Kabupaten Cirebon di tingkat Provinsi Jawa Barat dan nasional, mewujudkan olah raga sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Bidang Kebudayaan. Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada penguatan pelestarian ragam budaya tradisional dan kearifan lokal masyarakat Cirebon melalui aktualisasi dan pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal, pengelolaan kekayaan dan pengelolaan keragaman budaya.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diprioritaskan pada penurunan dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pengembangan model operasional Bina Keluarga Balita (BKB), posyandu, dan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU), pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) mandiri, kemandirian keluarga, peningkatan kualitas hidup keluarga, dan peningkatan kualitas data kependudukan

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri. Pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tetap diprioritaskan pada peningkatan wawasan, kesadaran dan tindakan masyarakat dalam tatanan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara melalui kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; pendidikan politik masyarakat; peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi.

Misi kedua: Meningkatkan Lingkungan Hidup yang Lestari

Bidang Lingkungan Hidup. Pembangunan dibidang lingkungan hidup diprioritaskan pada peningkatan kualitas lingkungan melalui peningkatan pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berbasis teknologi ramah lingkungan; partisipasi dan kemitraan masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam, konsistensi dalam penegakan hukum, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan, sistem mitigasi dan penanggulangan bencana alam yang handal, memantapkan daya dukung

lingkungan, mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, dan tertatanya kawasan rawan bencana.

Bidang Penataan Ruang. Pembangunan dibidang penataan ruang diprioritaskan pada peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW, rencana kawasan strategis dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui peran serta masyarakat, pemantapan sistem pengendalian dan koordinasi dalam pengaturan pembinaan, pelaksanaan serta pengawasan penataan ruang. terpeliharanya alokasi ruang kawasan lindung dan lahan sawah, optimalisasi kawasan budidaya untuk tumbuh dan berkembang tanpa mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan infrastruktur data dan informasi spasial telah dapat digunakan dengan mantap dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang.

Bidang Pertanahan. Pembangunan dibidang pertanahan diprioritaskan pada peningkatan tertib administrasi inventaris asset tanah pemerintah daerah melalui pelaksanaan program penataan penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Energi dan Sumber daya Mineral. Pembangunan dibidang energi dan sumber daya mineral diprioritaskan pada pengurangan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan melalui peningkatan pelaksanaan program pengawasan dan penertiban kegiatan penambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, dan penyediaan sumber energi listrik bagi masyarakat miskin melalui pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, diversifikasi alternatif sumber energi non migas.

Bidang Kelautan dan Perikanan. Pembangunan bidang kelautan dan perikanan diprioritaskan pada pelestarian sumber daya kelautan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan sasaran bertambahnya luas area tanaman mangrove di wilayah pesisir menjadi 450 ha bertambahnya jumlah terumbu karang buatan yang ditenggelamkan di laut menjadi 250 unit, peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan komersial dan rekreasi, pengembagnan usaha

pengolahan hasil, pengembangan sistem informasi kelautan dan perikanan, pengembangan budaya kelautan, dan pengembangan eko-konservasi kelautan.

Bidang Perumahan dan Permukiman. Pembangunan dibidang perumahan dan permukiman diprioritaskan pada peningkatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, lingkungan sehat permukiman, pengembangan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan.

Bidang Kehutanan. Pembangunan dibidang kehutanan diprioritaskan pada pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Misi ketiga: Meningkatkan perekonomian yang kuat

Bidang ketenagakerjaan. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, pemantapan sistem jejaring kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan, peningkatan peran lembaga ketenagakerjaan, sinergisitas sistem pendidikan dan ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan tenaga kerja berbasis potensi lokal dan kewirausahaan, pengembangan kurikulum yang berbasis dunia kerja, dan penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industrial.

Bidang Ketransmigrasian. Pembangunan dibidang ketransmigrasian diprioritaskan pada peningkatan jumlah lokasi tujuan transmigrasi, jumlah transmigran yang memperoleh peluang berusaha dan tempat tinggal, dan pembinaan transmigran melalui program pengembangan wilayah transmigrasi dengan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa diprioritaskan pada peningkatan peran serta masyarakat, kapasitas kelembagaan dan aparaturnya pemerintah desa melalui program pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan aparatur desa, dan pemberdayaan lembaga ekonomi pedesaan, peningkatan pelaksanaan program desa membangun, dan peningkatan kesejahteraan aparatur desa.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Pembangunan dibidang KUMKM diprioritaskan pada peningkatan penguatan jaringan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM melalui upaya penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah, perluasan pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Bidang Pertanian. Pembangunan dibidang pertanian diprioritaskan pada peningkatan produksi dan nilai tambah atau produktivitas hasil pertanian, dan pengembangan pola agribisnis berbasis potensi lokal, perluasan pangsa pasar hasil pertanian, penguatan sistem pertanian, dan terpeliharanya lahan sawah.

Bidang Ketahanan Pangan. Pembangunan dibidang ketahanan pangan diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan petani, diversifikasi pangan, penguatan kelembagaan petani, ketersediaan dan pengaturan pola distribusi hasil produksi.

Bidang Pariwisata. Pembangunan bidang pariwisata diprioritaskan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata di Kabupaten Cirebon melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Cirebon, peningkatan industri pariwisata melalui pengelolaan pariwisata yang lebih profesional, dan menciptakan masyarakat sadar wisata.

Bidang Perdagangan. Pembangunan dibidang perdagangan diprioritaskan pada revitalisasi pasar tradisional, pengembangan kemampuan inovasi dan kualitas produksi, peningkatan kemampuan sumber daya perdagangan, mendorong perdagangan berbasis potensi lokal yang berorientasi ekspor, perluasan jaringan perdagangan luar negeri, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam

negeri dan pengembangan pasar dalam negeri, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen melalui pendirian layanan pengaduan konsumen.

Bidang Industri. Pembangunan dibidang industri diprioritaskan pada peningkatan kemampuan sumber daya industri, pengembangan industri kecil yang tangguh, peningkatan penggunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem produksi, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar, dan penerapan sistem insentif dan disinsentif.

Bidang Penanaman Modal. Pembangunan dibidang penanaman modal diprioritaskan pada peningkatan penciptaan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing melalui peningkatan pelayanan penanaman modal dengan berbasis sistem teknologi informasi-komunikasi, dan memanfaatkan data base peluang investasi di tingkat lokal dan regional,

Bidang Pekerjaan Umum. Pembangunan dibidang pekerjaan umum diprioritaskan pada peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan pencegahan dan pengendalian banjir dan kekeringan, percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah tertinggal, peningkatan kemantapan infrastruktur yang telah ada, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di wilayah strategis.

Bidang Perhubungan. Pembangunan dibidang perhubungan diprioritaskan pada peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan, pelayanan angkutan ke seluruh daerah pedesaan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dan penataan angkutan umum.

Misi keempat: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Bidang Perencanaan Pembangunan. Pembangunan dibidang perencanaan pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan

melalui pemantapan fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur perencana, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Bidang Komunikasi dan Informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika diprioritaskan pada pemanfaatan sistem informasi komunikasi daerah untuk menginformasikan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan hasil-hasil pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan di kabupaten Cirebon, menampung keluhan dan pengaduan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur informasi dan komunikasi sampai seluruh desa dan kelurahan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pembangunan dalam bidang ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas belanja pembangunan, peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, kapasitas lembaga legislatif, kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dan kinerja PNS

Bidang Statistik. Pembangunan dibidang statistik diprioritaskan pada pelaksanaan sistem data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

Bidang Kearsipan. Pembangunan bidang kearsipan diprioritaskan pada peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan daerah dan kinerja pengelolaan kearsipan menuju tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan sistem informasi administrasi kearsipan di setiap instansi pemerintah daerah

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil diprioritaskan pada peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (cepat, tepat, murah dan transparan) dan kualitas data kependudukan melalui pelaksanaan program sistem informasi administrasi kependudukan sampai tingkat desa.

4.2.5 RPJM Daerah Kelima (2024 – 2025)

Pembangunan tahap kelima ditujukan untuk mempertahankan keunggulan disegala bidang sehingga kesejahteraan masyarakat memiliki sifat keberlanjutan dengan kecenderungan yang semakin meningkat.

Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi pertama: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Bidang Agama. Pembangunan di bidang agama diprioritaskan pada pemantapan implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih baik.

Bidang Pendidikan. Pembangunan dibidang pendidikan diprioritaskan pada pemantapan pembangunan peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf melalui pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat terutama bagi keluarga kurang mampu, tuntas program wajib belajar dua belas tahun disertai dengan peningkatan kualitas siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah dan bantuan bea siswa dari keluarga yang kurang mampu, perintisan program wajib belajar lima belas tahun, pengembangan pelayanan pendidikan luar sekolah dan pendidikan informal berbasis potensi daerah dan pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi berskala nasional dan internasional, peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi, dan pendidikan ketrampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat

Bidang perpustakaan. Pembangunan dibidang perpustakaan diprioritaskan untuk mempertahankan angka melek huruf di seluruh masyarakat dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pembangunan taman bacaan di setiap desa.

Bidang Kesehatan. Pembangunan dibidang kesehatan diprioritaskan melalui pemantapan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah, mutu dan jenis tenaga kesehatan, pemberdayaan profesi kesehatan (institusi), dan terwujudnya sistem

insentif dan disinsentif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada pemantapan kemandirian dan daya saing perempuan dalam memperoleh kesempatan berusaha, peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, peningkatan kualitas hidup perempuan. Sedangkan peningkatan perlindungan terhadap anak dilakukan melalui optimalisasi peran keluarga dan lembaga perlindungan anak.

Bidang Sosial. Pembangunan dibidang sosial diprioritaskan pada pemantapan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui peningkatan pemberdayaan PMKS; dan peningkatan kuantitas dan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga dan kelompok masyarakat melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, serta peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga diprioritaskan untuk mempertahankan prestasi olah raga menjadi 10 cabang olah raga melalui pemanfaatan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi dengan penambahan pembangunan GOR; dan peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan sebanyak 60% melalui program peningkatan peran serta kepemudaan, penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pencapaian kemandirian pemuda dan olahraga, mempertahankan keunggulan olah raga Kabupaten Cirebon di tingkat Provinsi Jawa Barat dan nasional, mewujudkan olah raga sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Bidang Kebudayaan. Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada pemantapan pelestarian ragam budaya tradisional dan kearifan lokal masyarakat Cirebon melalui aktualisasi dan pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal, pengelolaan kekayaan dan pengelolaan keragaman budaya.

Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera. Pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diprioritaskan pada mempertahankan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pengembangan model operasional Bina Keluarga Balita (BKB), posyandu, dan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU), pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) mandiri, kemandirian keluarga, peningkatan kualitas hidup keluarga, dan peningkatan kualitas data kependudukan

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri. Pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tetap diprioritaskan pada pemantapan wawasan, kesadaran dan tindakan masyarakat dalam tatanan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara melalui kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; pendidikan politik masyarakat; peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi.

Misi kedua: Meningkatkan Lingkungan Hidup yang lestari

Bidang Lingkungan Hidup. Pembangunan dibidang lingkungan hidup diprioritaskan pada pemantapan kualitas lingkungan melalui peningkatan pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berbasis teknologi ramah lingkungan; partisipasi dan kemitraan masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam, konsistensi dalam penegakan hukum, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan, sistem mitigasi dan penanggulangan bencana alam yang handal, memantapkan daya dukung lingkungan, mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, dan tertatanya kawasan rawan bencana.

Bidang Penataan Ruang. Pembangunan dibidang penataan ruang diprioritaskan pada pemantapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW, rencana kawasan strategis dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui peran serta masyarakat, pemantapan sistem pengendalian dan koordinasi dalam pengaturan pembinaan, pelaksanaan serta pengawasan penataan ruang.

terpeliharanya alokasi ruang kawasan lindung dan lahan sawah, optimalisasi kawasan budidaya untuk tumbuh dan berkembang tanpa mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan infrastruktur data dan informasi spasial telah dapat digunakan dengan mantap dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang.

Bidang Pertanahan. Pembangunan dibidang pertanahan diprioritaskan pada pemantapan tertib administrasi inventaris asset tanah pemerintah daerah melalui pelaksanaan program penataan penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Energi dan Sumber daya Mineral. Pembangunan dibidang energi dan sumber daya mineral diprioritaskan pada perbaikan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan melalui peningkatan pelaksanaan program pengawasan dan penertiban kegiatan penambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, dan penyediaan sumber energi listrik bagi masyarakat miskin melalui pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, diversifikasi alternatif sumber energi non migas.

Bidang Kelautan dan Perikanan. Pembangunan bidang kelautan dan perikanan diprioritaskan pada pemantapan pelestarian sumber daya kelautan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan sasaran bertambahnya luas area tanaman mangrove di wilayah pesisir, bertambahnya jumlah terumbu karang buatan, peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan komersial dan rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan sistem informasi kelautan dan perikanan, pengembangan budaya kelautan, dan pengembangan eko-konservasi kelautan.

Bidang Perumahan dan Permukiman. Pembangunan dibidang perumahan dan permukiman diprioritaskan pada pemantapan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, lingkungan sehat permukiman, pengembangan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan.

Bidang Kehutanan. Pembangunan dibidang kehutanan diprioritaskan pada pemantapan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan melalui perluasan hutan rakyat, dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Misi ketiga: Meningkatkan perekonomian yang kuat

Bidang ketenagakerjaan. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada pemantapan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, sistem jejaring kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan, peran lembaga ketenagakerjaan, sinergisitas sistem pendidikan dan ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja, tenaga kerja berbasis potensi lokal dan kewirausahaan, pengembangan kurikulum yang berbasis dunia kerja, dan penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industrial.

Bidang Ketransmigrasian. Pembangunan dibidang ketransmigrasian diprioritaskan pada pemantapan lokasi tujuan transmigrasi, jumlah transmigran yang memperoleh peluang berusaha dan tempat tinggal, dan pembinaan transmigran melalui program pengembangan wilayah transmigrasi dengan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa diprioritaskan pada pemantapan peran serta masyarakat, kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa melalui program pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan aparatur desa, dan pemberdayaan lembaga ekonomi pedesaan, pelaksanaan program desa membangun, dan kesejahteraan aparatur desa.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Pembangunan dibidang KUMKM diprioritaskan pada pemantapan jaringan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM melalui upaya penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah,

pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah, perluasan pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Bidang Pertanian. Pembangunan dibidang pertanian diprioritaskan pada pemantapan produksi dan nilai tambah atau produktivitas hasil pertanian, dan pengembangan pola agribisnis berbasis potensi lokal, perluasan pangsa pasar hasil pertanian, penguatan sistem pertanian, dan terpeliharanya lahan sawah

Bidang Ketahanan Pangan. Pembangunan dibidang ketahanan pangan diprioritaskan pada pemantapan kesejahteraan petani, diversifikasi pangan, kelembagaan petani, ketersediaan dan pengaturan pola distribusi hasil produksi.

Bidang Pariwisata. Pembangunan bidang pariwisata diprioritaskan pada mempertahankan keunggulan daya tarik wisata di Kabupaten Cirebon melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Cirebon, peningkatan industri pariwisata melalui pengelolaan pariwisata yang lebih profesional, dan menciptakan masyarakat sadar wisata

Bidang Perdagangan. Pembangunan dibidang perdagangan diprioritaskan pada pemantapan revitalisasi pasar tradisional, pengembangan kemampuan inovasi dan kualitas produksi, kemampuan sumber daya perdagangan, mendorong perdagangan berbasis potensi lokal yang berorientasi ekspor, perluasan jaringan perdagangan luar negeri, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen melalui pendirian layanan pengaduan konsumen.

Bidang Industri. Pembangunan dibidang industri diprioritaskan pada pemantapan kemampuan sumber daya industri, pengembangan industri kecil yang tangguh, peningkatan penggunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem produksi, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar, dan penerapan sistem insentif dan disinsentif.

Bidang Penanaman Modal. Pembangunan dibidang penanaman modal diprioritaskan pada pemantapan penciptaan iklim investasi yang kondusif dan

berdaya saing melalui peningkatan pelayanan penanaman modal dengan berbasis sistem teknologi informasi-komunikasi, dan memanfaatkan data base peluang investasi di tingkat lokal dan regional.

Bidang Pekerjaan Umum. Pembangunan dibidang pekerjaan umum diprioritaskan pada pemantapan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, pencegahan dan pengendalian banjir dan kekeringan, percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah tertinggal, infrastruktur yang telah ada, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di wilayah strategis.

Bidang Perhubungan. Pembangunan dibidang perhubungan diprioritaskan pada pemantapan kelancaran distribusi barang dan jasa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan, pelayanan angkutan ke seluruh daerah pedesaan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dan penataan angkutan umum.

Misi keempat: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Bidang Perencanaan Pembangunan. Pembangunan dibidang perencanaan pembangunan diprioritaskan pada pemantapan kualitas perencanaan pembangunan melalui pemantapan fungsi kelembagaan, pemantapan kapasitas aparatur perencana, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Bidang Komunikasi dan Informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika diprioritaskan pada pemantapan sistem informasi komunikasi daerah untuk menginformasikan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan hasil-hasil pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan di kabupaten Cirebon, menampung keluhan dan pengaduan masyarakat, dan pemantapan infrastruktur informasi dan komunikasi sampai seluruh desa dan kelurahan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pembangunan dalam bidang ini diprioritaskan pada pemantapan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi melalui pemantapan kualitas dan kuantitas belanja pembangunan, pemantapan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, kapasitas lembaga legislatif, kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dan kinerja PNS

Bidang Statistik. Pembangunan dibidang statistik diprioritaskan pada pemantapan pelaksanaan sistem data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

Bidang Kearsipan. Pembangunan bidang kearsipan diprioritaskan pada pemantapan mutu penyelenggaraan kearsipan daerah dan kinerja pengelolaan kearsipan menuju tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan sistem informasi administrasi kearsipan di setiap instansi pemerintah daerah.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil diprioritaskan pada pemantapan pelayanan administrasi kependudukan (cepat, tepat, murah dan transparan) dan kualitas data kependudukan melalui pelaksanaan program sistem informasi administrasi kependudukan sampai tingkat desa.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 20 tahun ke depan.

RPJPD ini juga menjadi pedoman bagi calon bupati dan wakil bupati dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi **Terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan produktif menuju masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera** perlu didukung oleh:

1. Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis
2. Konsistensi kebijakan pemerintah daerah
3. Keberpihakan kepada rakyat
4. Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR: TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Cirebon memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai landasan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, mengamanatkan tentang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005 - 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Bupati adalah Bupati Cirebon.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Cirebon.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang kabupaten.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah, RPJP Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional.

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan :
 - a. RPJP Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati
 - b. RTRW Kabupaten; dan
 - c. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) RPJP Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten yang memuat Visi, Misi, dan Program Bupati.
- (3) Periodisasi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.

BAB III

TATA URUT RPJP DAERAH

Pasal 6

Tata urutan RPJP Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, landasan hukum, tata urutan, kerangka pikir, dan proses penyusunan.

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH

Berisi tentang kondisi saat ini, tantangan dan modal dasar.

BAB III : VISI DAN MISI

Berisi tentang Visi Pembangunan Daerah dan Misi Pembangunan

**BAB IV : ARAH TAHAPAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2005-2025**

Berisi tentang tahapan dan prioritas pembangunan.

BAB V : PENUTUP

Pasal 7

Isi beserta uraian RPJP Daerah tercantum dalam Lampiran, yang menyatakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 Tahun

Pasal 10

Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Rencana Strategis atau RPJM dan RPJP Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lambat 6 (enam) bulan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025, telah ditetapkan visi pembangunan nasional tahun 2005 – 2025, yaitu “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Visi pembangunan nasional tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam:

- a. RPJM Daerah I Tahun 2005–2009;
- b. RPJM Daerah II Tahun 2009–2014;
- c. RPJM Daerah III Tahun 2014–2019;
- d. RPJM Daerah IV Tahun 2019–2024;
- e. RPJM Daerah V Tahun 2024-2025.

RPJP Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih

secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program, dan kerangka pendanaan daerah.

RPJM Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan anggaran pembangunan daerah.

RPJP daerah ini mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kabupaten Cirebon dengan tetap memperhatikan arahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat serta merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah, RTRW Kabupaten, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik di Kabupaten.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024. Namun demikian, bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJP Daerah adalah 2005-2025.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang RPJP Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 – 2025 adalah untuk:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan daerah, provinsi dan nasional;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJP Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005–2025 ditetapkan dengan maksud:

1. Memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen masyarakat Cirebon (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati

bersama baik pada tataran level Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa barat maupun Nasional.

2. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon.
3. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon.

Tujuan penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005– 2025 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah kabupaten Cirebon.
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah perbatasan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah.
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi kabupaten, provinsi maupun nasional.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan daerah ini

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD tahun 2010, 2014, 2019, dan 2024. Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai bidang tugasnya.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR